



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BPSPL
DENPASAR

BKRP



LAPORAN KINERJA

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir
dan Laut Denpasar

Tahun 2025



**BPSPL
DENPASAR**
#BijakMengelolaLaut



TIM PENYUSUN

PENGARAH

Getreda Melsina Hehanussa

PENYUSUN

A. Bobby Yefry Adi Rianto

Faizal Tuhulele

Suci Kusumastuti Nur Azizah

Dewi Setiyaningsih

KONTRIBUTOR

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan
Laut Denpasar

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	2
1.4 Organisasi.....	4
1.5 Kepegawaian.....	6
1.6 Potensi	9
1.7 Permasalahan dan Tantangan.....	14
1.8 Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025 – 2029	19
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
2.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2025	23
2.4 Keselarasan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 – 2029, Rencana Kerja 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	26
3.2 Evaluasi atas Capaian Kinerja Tahun 2025.....	29
IK 1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	29
IK 2. Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	46
IK 3. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis).....	49
IK 4. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai).....	61

IK 5. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	64
IK 6. IK. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen).....	68
IK 7. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	76
IK 8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) ..	80
IK 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	82
IK 10. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	86
IK 11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	87
IK 12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)	90
IK 13. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar(%)	92
IK 14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	94
IK 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	95
IK 16. Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%).....	98
IK 17. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai).....	100
3.3 Kinerja Anggaran	104
3.4 Tindak Lanjut atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2025	108
3.5 Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain.....	109
BAB IV PENUTUP.....	113
5.1 Kesimpulan.....	113
5.2 Rekomendasi.....	114
5.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Sebelumnya	114
BAB V LAMPIRAN	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama Satker dan Wilayah Kerja.....	5
Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia	10
Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar.....	11
Tabel 4. Potensi Perikanan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	11
Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	12
Tabel 6. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2025	21
Tabel 7. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2025	26
Tabel 8. Capaian IK 1 BPSPL Denpasar.....	29
Tabel 9. Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor.....	32
Tabel 10. Sarana dan Prasarana untuk Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor	38
Tabel 11. Capaian IK 2 BPSPL Denpasar	46
Tabel 12. Capaian IK 3 BPSPL Denpasar	49
Tabel 13. Dokumentasi IK Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	59
Tabel 14. Capaian IK 4 BPSPL Denpasar	62
Tabel 15. Dokumen Angkut Terbit Tahun 2025	63
Tabel 16. Capaian IK 5 BPSPL Denpasar	65
Tabel 17. Capaian IK 6 BPSPL Denpasar	69
Tabel 18. Dokumentasi Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	71
Tabel 19. Pelaksanaan Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	75
Tabel 20. Dokumentasi Kegiatan Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	76
Tabel 21. Capaian IK 7 BPSPL Denpasar	78
Tabel 22. Capaian IK 8 BPSPL Denpasar	80
Tabel 23. Capaian IK 9 BPSPL Denpasar	85
Tabel 24. Capaian IK 10 BPSPL Denpasar	86
Tabel 25. Capaian IK 11 BPSPL Denpasar	88
Tabel 26. Capaian IK 12 BPSPL Denpasar	91
Tabel 27. Capaian IK 13 BPSPL Denpasar	93
Tabel 28. Capaian IK 14 BPSPL Denpasar	94
Tabel 29. Capaian IK 15 BPSPL Denpasar	97
Tabel 30. Capaian IK 16 BPSPL Denpasar	99
Tabel 31. Capaian IK 17 BPSPL Denpasar	102
Tabel 33 . Media Publikasi BPSPL Denpasar	103
Tabel 33. Realisasi Anggaran BPSPL Denpasar Tahun 2025.....	106
Tabel 34. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2025	109

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Status Pegawai BPSPL Denpasar TA 2025 6

Grafik 2. Perincian PPPK BPSPL Denpasar TA 2025 7

Grafik 3. Klasifikasi Berdasarkan Golongan ASN BPSPL Denpasar TA 20257

Grafik 4. Tingkat Pendidikan ASN BPSPL Denpasar TA 2025..... 8

Grafik 5. Distribusi SDM BPSPL Denpasar TA 2025..... 9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPSPL Denpasar.....	5
Gambar 2. Nilai Perolehan Sasaran Strategis BPSPL Denpasar	26
Gambar 3. Lokasi Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor.....	31
Gambar 4. Rute Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor.....	35
Gambar 5. Penjangkauan Stakeholder Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Alor.....	36
Gambar 6. Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi.....	49
Gambar 7. Dokumen SAJI DN Hiu dan Pari Terbit Tahun 2025.....	51
Gambar 8. Perdagangan Hiu BPSPL Denpasar Tahun 2025	51
Gambar 9. Perdagangan Pari BPSPL Denpasar Tahun 2025.....	52
Gambar 10. Dokumen SAJI DN Banggai Cardinal Fish Terbit Tahun 2025.....	53
Gambar 11. Dokumen Rekomendasi DN Teripang Terbit Tahun 2025	53
Gambar 12. Dokumen Rekomendasi LN Teripang Terbit Tahun 2025	54
Gambar 13. Dokumen Rekomendasi SAA Terbit Tahun 2025	54
Gambar 14. Dokumen Rekomendasi SAA Terbit Tahun 2025	55
Gambar 15. Dokumen SAJI DN Arwana Terbit Tahun 2025	55
Gambar 16. Dokumen SAJI DN Sidat Terbit Tahun 2025.....	56
Gambar 17. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	58
Gambar 18. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat BPSPL Denpasar Tahun 2025	64
Gambar 19. Kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.....	68
Gambar 20. Kegiatan Verifikasi Penilaian Teknis Permohonan KKPRL oleh BPSPL Denpasar Tahun 2025.....	71
Gambar 21. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian KKPRL BPSPL Denpasar Tahun 2025	74

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat dan rahmatNya, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Denpasar Tahun 2025 yang mendokumentasikan secara singkat mengenai gerak langkah dan kontribusi BPSPL Denpasar selama Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan gambaran dan informasi tentang capaian program dan kegiatan BPSPL Denpasar selama Tahun 2025 melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Denpasar dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian atas terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Denpasar.

Gianyar, 31 Desember 2025

Kepala BPSPL Denpasar



Getreda Melsina Hehanussa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada Laporan Kinerja (LKj) tahun 2025 ini telah mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja BPSPL Denpasar tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Pada pelaporan LKj tahun 2025, data capaian dan target BPSPL Denpasar telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan di dalam folder bit.ly/SAKIPDJPKRL serta sesuai dengan format Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen KP No. 68/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP.

Capaian Indikator Kinerja (IK) yang dapat diukur pada tahun 2025 adalah sebagai berikut IK 1 Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi) target 1 provinsi dan capaian 1 provinsi; IK 2 Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang) target 30 orang tercapai 30 orang; IK 3 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) target 5 jenis dan

capaian 7 jenis; IK 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai) target 80 dan capaian 90; IK 5 Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) target 1 dokumen dan capaian 1 dokumen; IK 6 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) target 2 dokumen dan capaian 2 dokumen; IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) target 70 dan capaian 86,90; IK 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) target 89 dan capaian 94,11; IK 9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) target 71,5 dan capaian 97,86; IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) dengan target 4 dokumen dan capaian 4 dokumen; IK 11 Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (Indeks) target 80 dan capaian 86,85; IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%) dengan target 95 dan capaian 87; IK 13 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%) dengan target 100 dan capaian 100; IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai) dengan target 75 dan capaian 87,57; IK 15 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai) dengan target 80 dan capaian 86,11; IK 16 Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Denpasar (%) dengan target 76 dan capaian 100; IK 17 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Denpasar (Nilai) dengan target 91 dan capaian 100.

Pagu awal BPSPL Denpasar tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp20.627.700.000,- yang terdiri dari rupiah murni Rp12.012.700.000,-, PNBPN Rp2.075.000.000,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp6.540.000.000,-. Pada Bulan Februari Tahun 2025, terdapat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi pada anggaran dibawah pengelolaannya. Setelah dilakukan revisi DIPA efisiensi anggaran pada tanggal 23 Februari 2025, pagu anggaran BPSPL Denpasar sebesar Rp20.627.700.000,- dengan jumlah dana yang diblokir sebesar Rp4.523.858.000,- yang terdiri dari belanja

barang (52) Rp 4.499.358.000,- dan belanja modal (53) Rp24.500.000,-. Pada Triwulan II terdapat pengesahan revisi DIPA berupa penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA dalam rangka buka blokir anggaran kode 2 pada sumber dana PNBP sebesar Rp. 2.075.000.000,- sesuai surat dari Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan nomor S-531/AG/AG.3/2025 tanggal 17 Juni 2025. Adapun anggaran belum dapat digunakan dikarenakan masih menunggu persetujuan penetapan Maksimum Pencairan PNBP dari Kementerian Keuangan. Triwulan III dilaksanakan reviu rekomposisi usulan tambahan izin penggunaan PNBP Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025. Rekomposisi ini dilaksanakan karena adanya penambahan anggaran sumber dana PNBP Tahun Anggaran 2025 yang semula Rp1.200.000.000,- menjadi Rp11.650.000.000,-. Pada Triwulan IV dilakukan sebelas kali revisi anggaran meliputi satu kali revisi halaman III DIPA, lima kali revisi pemutakhiran KPA, dua kali revisi Satker/POK, satu kali revisi DIPA kewenangan Kanwil, satu kali revisi penambahan pagu sumber dana PNBP, dan satu kali revisi DIPA relaksasi anggaran. Pada triwulan ini terdapat penambahan pagu bersumber dana PNBP sejumlah Rp11.029.054.000,-. Revisi relaksasi dilakukan pengurangan anggaran pada sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp600.822.000,- dari anggaran semula Rp31.656.754.000,- menjadi Rp31.055.932.000,- terdiri atas belanja pegawai (51) Rp497.483.000,- dan belanja barang (52) Rp103.339.000,-. Revisi pemutakhiran KPA dan revisi Satker/POK dilakukan untuk menyesuaikan pagu disetiap detil untuk mengakomodir percepatan pelaksanaan kegiatan. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 (Per 31 Desember 2025) sesuai data omspan sebesar Rp27.124.640.662,- (87,34%) dengan total blokir Rp2.291.859.000,- dengan rincian realisasi belanja pegawai Rp7.401.629.623,- (92,30%), belanja barang Rp12.977.586.171,- (82,22%), dan belanja modal Rp6.745.424.868,- (93,01%).

Pengukuran capaian kinerja kinerja BPSPL Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja utama atau indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan yang tercantum pada perjanjian kerja. Hasil Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) IKU+IKM BPSPL Denpasar Tahun 2025 adalah

106,07% yang berkategori baik dengan ditandai warna hijau pada aplikasi kinerja (kinerjaku.kkp.go.id).

Langkah-langkah strategis yang akan diambil sebagai upaya dalam menjawab berbagai tantangan dan peningkatan kinerja BPSPL Denpasar kedepan antara lain; Melaksanakan peningkatan pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan Apendiks CITES; Melaksanakan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Denpasar; Melaksanakan peningkatan dalam penataan ruang laut, Melaksanakan peningkatan kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Denpasar dengan tatakelola pemerintahan yang baik, dan melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta melakukan pemantauan kinerja secara berkala.



BABI PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar telah menunjuk Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2025.

Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan. Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2025.

1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar adalah unit pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut tanggal 6 September 2021. Secara khusus UPT mengawal UU No 31 tahun 2004 Jo UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan beserta turunannya dan UU No. 27 tahun 2007 Jo UU No 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil beserta turunannya. Sehingga BPSPL Denpasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugasnya BPSPL Denpasar menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;

- 5) Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- 9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Denpasar secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
- 2) Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah;
- 3) Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan jenis-jenis spesifik; Koleksi dan breeding; Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas Negara; Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional.
- 4) Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindak-lanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (*Convention on Biological Diversity*), Ramsar *Convention on Wetlands of Internasional Importance*, WHS (*World Heritage Site*), dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*); yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi DJPKRL di daerah, termasuk kerja sama regional seperti *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF);

- 5) Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PKRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- 6) Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
- 7) Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan SDG (*Sustainable Development Goals*), antar lain; menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.4 Organisasi

Struktur Organisasi BPSPL Denpasar berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN/KP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN/KP/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSPL Denpasar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPSPL Denpasar dibantu 3 Satuan Kerja (Satker) yang mana pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2011 yaitu Satker Surabaya, Satker Mataram dan Satker Kupang.

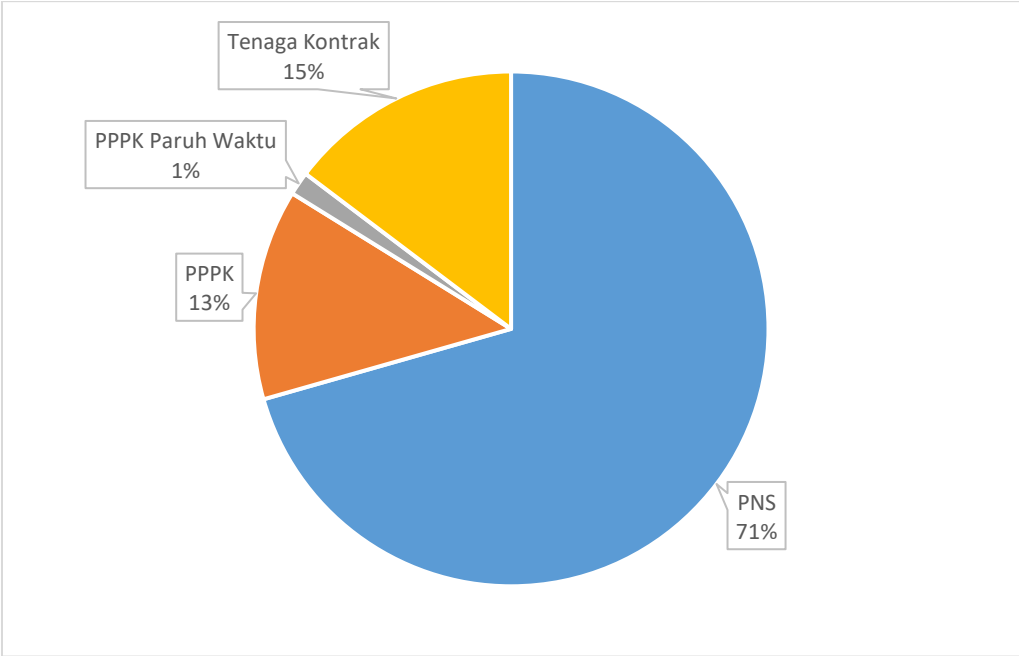
Tabel 1. Nama Satker dan Wilayah Kerja

No	Nama Satker	Koordinator	Wilayah Kerja
1.	Satker Surabaya	Suwardi, S.T., M.Si	Provinsi Jatim
2.	Satker Mataram	Muhammad Barmawi, M.Sc	Provinsi NTB
3.	Satker Kupang	Muhammad Dikyah Fadillah, S.Pi.	Provinsi NTT
4.	Pos Pelayanan Banyuwangi	Dewi Retnoningrum, S.Pi	Provinsi Jatim

1.5 Kepegawaian

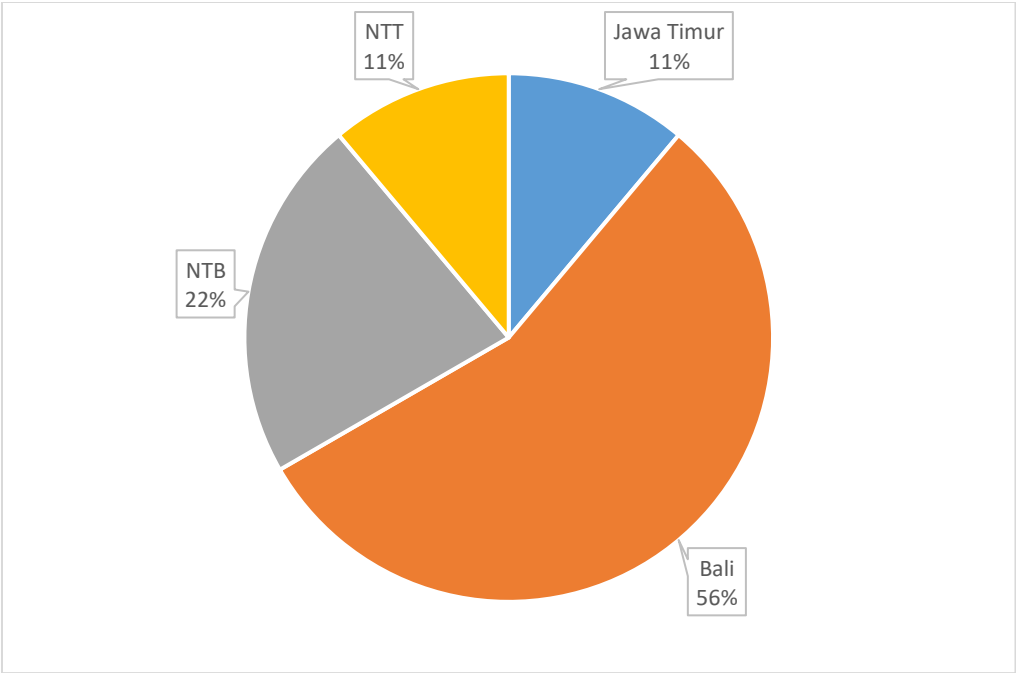
Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. Jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Tenaga Kontrak pada tahun 2025 sebanyak 68 orang terdiri dari 58 ASN (48 PNS, 9 PPPK, dan 1 PPPK Paruh Waktu) dan 10 tenaga kontrak (*outsourcing*). Komposisi pegawai berdasarkan status pegawai ditampilkan sebagai berikut:

Grafik 1. Perbandingan Status Pegawai BPSPL Denpasar TA 2025



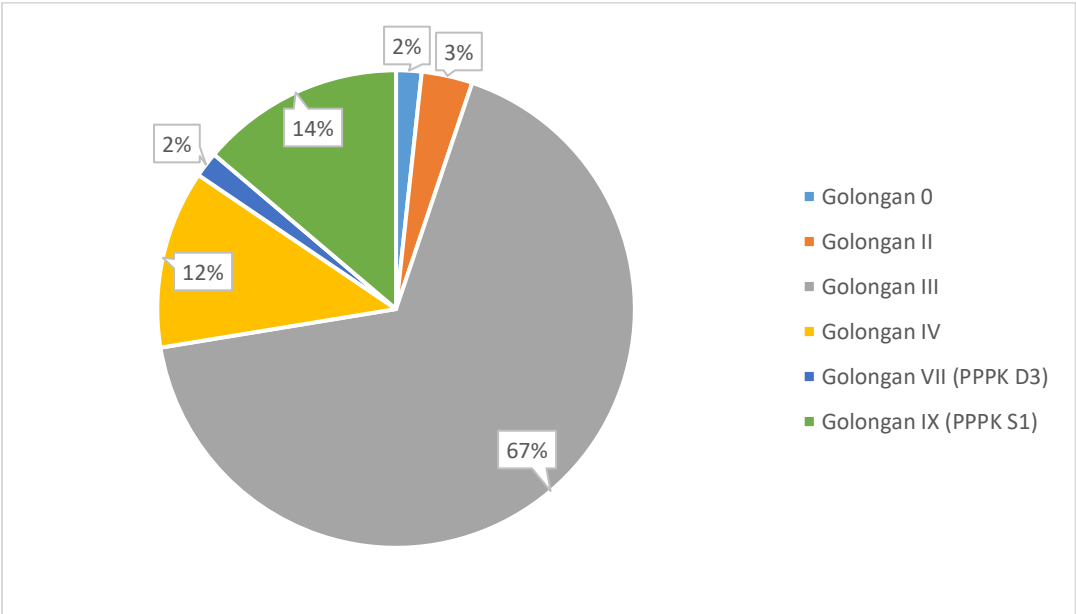
Adapun perincian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 9 orang yang tersebar di wilayah kerja Bali 5 orang, wilayah kerja Jawa Timur 1 orang, wilayah kerja NTB 2 orang, wilayah kerja NTT 1 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh waktu berada di wilayah kerja Bali 1 orang. Secara rinci ditampilkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 2. Perincian PPPK BPSPL Denpasar TA 2025



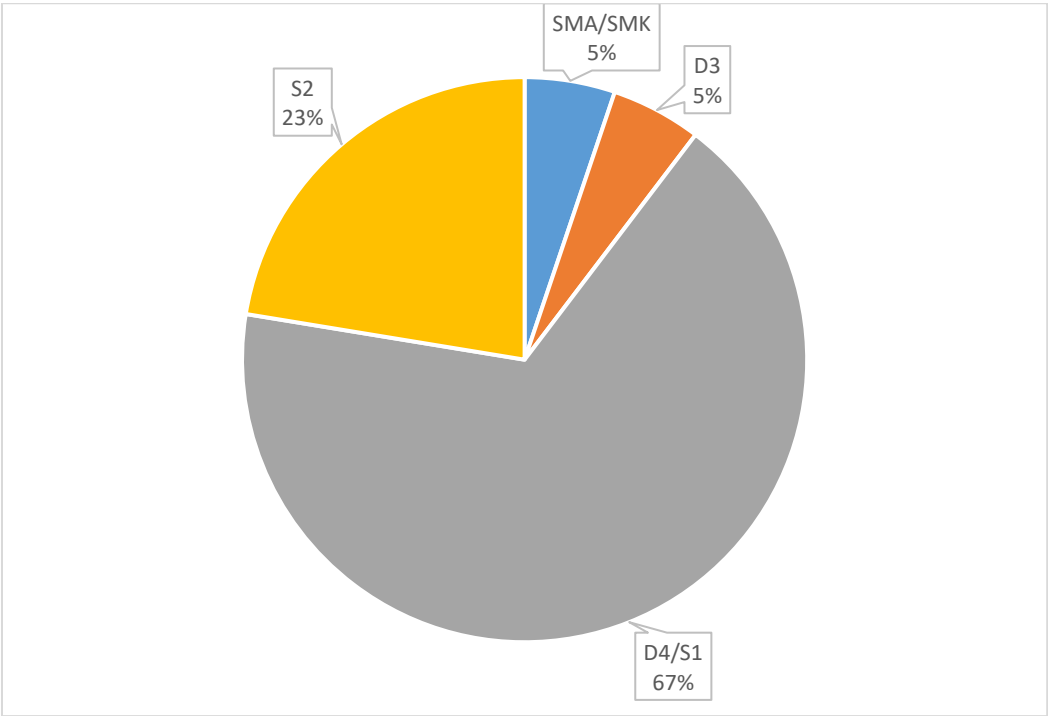
Sedangkan komposisi ASN berdasarkan golongan dan ruang ditampilkan pada grafik sebagai berikut.

Grafik 3. Klasifikasi Berdasarkan Golongan ASN BPSPL Denpasar TA 2025



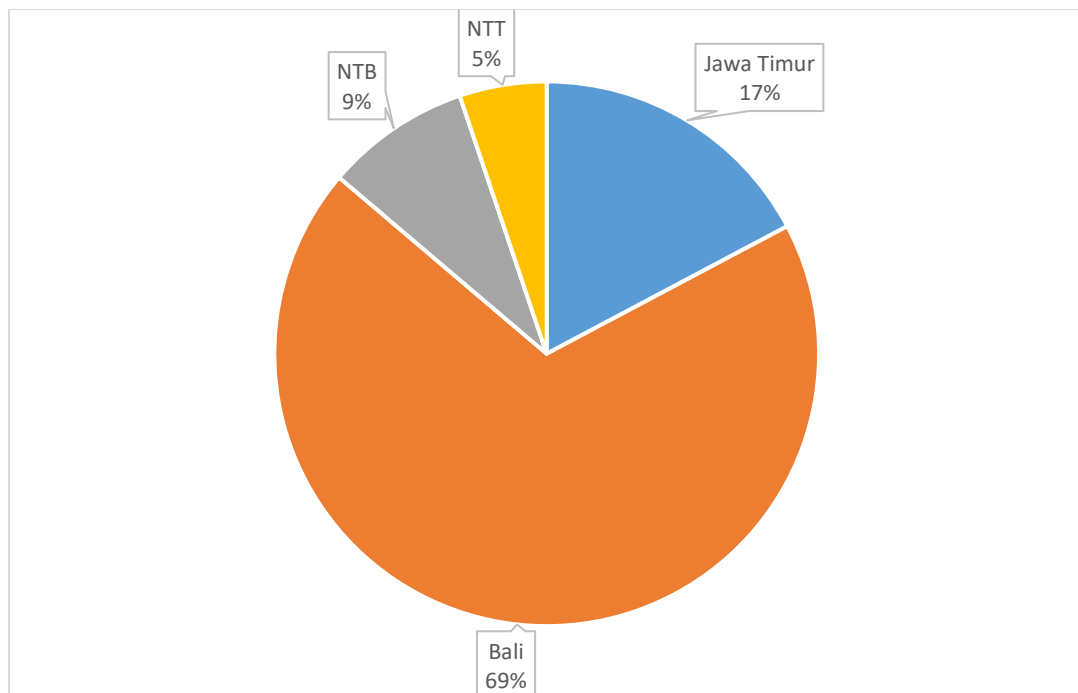
Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Denpasar merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Denpasar. Untuk komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada grafik 4 sebagai berikut.

Grafik 4. Tingkat Pendidikan ASN BPSPL Denpasar TA 2025



Selain tingkat pendidikan, penempatan SDM merupakan faktor yang penting dalam mencapai sasaran strategis BPSPL Denpasar yang telah ditetapkan, mengingat BPSPL Denpasar memiliki 3 kantor satker di Surabaya, Mataram dan Kupang. Berikut distribusi ASN di BPSPL Denpasar adalah wilayah kerja Bali 40 orang, wilayah kerja Jawa Timur 10 orang, wilayah kerja Nusa Tenggara Barat 5 orang, dan wilayah kerja Nusa Tenggara Timur 3 orang. Distribusi ASN BPSPL Denpasar tersaji pada grafik berikut:

Grafik 5. Distribusi SDM BPSPL Denpasar TA 2025



1.6 Potensi

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Secara geografis posisi Indonesia sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya kelautan dan perikanan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 8,3 juta km² dengan jumlah pulau mencapai 17.504 pulau dimana 16.671 pulau sudah dibakukan dan dilaporkan ke PBB. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,29 juta km², perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km², dan ZEE Indonesia mencapai 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Ditjen PRL, 2020).

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Lautan Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut

Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati laut, termasuk pulau-pulau kecilnya menyimpan banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun secara kesatuan mereka membentuk potensi “services” yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir, yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Terumbu Karang merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang tinggi serta memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan estetika yang tinggi, total luasan Terumbu Karang di Indonesia berdasarkan data dari LIPI 2.517.818 HA dengan keanekaragaman yang sangat beragam hingga ratusan lebih jenis karang. Sedangkan Padang lamun menyediakan perlindungan dan makanan bagi beberapa jenis ikan dan kerang-kerangan ekonomis penting. Total luasan Padang Lamun di Indonesia mencapai 1.507 Km² Dengan keanekaragaman jenis. Selain itu terdapat potensi mangrove kritis dan non kritis, ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang mempunyai fungsi dan manfaat yang beraneka ragam bagi manusia serta makhluk hidup lainnya.

Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia

No	Regional	Luas (Ha)
1	Sulawesi	862.627
2	Sumatera	478,587
3	Maluku	439,110
4	Nusa Tenggara	272,123
5	Papua	269,402
6	Kalimantan	119,304
7	Jawa	67,869
8	Bali	8,837
Total		2,517,858

Sumber: Pusat Penelitian Oseanografi LIPI

Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

NO	PROVINSI	Kritis	Non Kritis
		LUAS (HA)	LUAS HA
1	JAWA TIMUR	6166.809	1340.974
2	BALI	126.193	32.16374
3	NTB	3526.509	3322.79
4	NTT	1859.784	4440.741

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Wilayah Perairan di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara selain memiliki potensi sumber daya ikan baik perikanan budidaya maupun tangkap, juga memiliki potensi biota lainnya baik endemik, langka, dan dilindungi dari kelompok cetacean, crustacean, Bivalvia, testudinata (penyu), maupun kelas pisces.

Tabel 4. Potensi Perikanan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

No.	Provinsi	Potensi Perikanan	
		Budidaya (Ha)	Tangkap (ton/tahun)
1	Bali	12.679.041	95.014
2	Jawa Timur	856.487.585	481.499
3	NTB	392.344.829	220.732
4	NTT	92.773.720	123.652

Di wilayah kerja BPSPL Denpasar juga terdapat beranekaragam biota laut dilindungi yang dapat dilakukan pendataan dan monitoring. Biota tersebut dapat ditemukan di beberapa lokasi antara lain:

- Jawa Timur: Hiu Paus (Probolinggo), Hiu dan Pari Appendiks (Muncar-Banyuwangi, Brondong-Lamongan, Prigi-Trenggalek), Penyu (Banyuwangi, Trenggalek), Terumbu Karang (Banyuwangi, Kangean)
- Bali: Penyu (Gianyar, Klungkung, Denpasar, Badung, Jembrana, Buleleng), Hiu Appendiks (Benoa, Karangasem), Lumba-lumba (Lovina, TNBB), Terumbu Karang (Buleleng, Denpasar, Badung, Nusa Penida), Pari Manta (Nusa Penida-Klungkung)
- NTB: Penyu (Mataram, Kab. Sumbawa), Hiu Pari Appendiks (Tj. Luar, Sumbawa), Terumbu Karang (Lombok Utara, Sumbawa), Hiu Paus (Teluk Saleh-Sumbawa)

- NTT: Dugong (Alor), Lumba-lumba (Alor), Penyu (Lembata, Pulau Solor - Flores Timur), Terumbu Karang (Alor, Sikka, Ende), Teripang (Rote, Riung), Paus (Lembata), Pari Manta (Labuan Bajo), Hiu Pari Appendiks (Namosain-Kupang, Papela-Rote)

BPSPL Denpasar juga melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat dengan memberikan bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) berupa alat selam. Selain itu, BPSPL Denpasar juga menjalin kerjasama dengan instansi melalui kesepakatan perjanjian kerjasama di wilayah kerja.

Di wilayah kerja BPSPL Denpasar, terdapat banyak Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil baik yang telah ditetapkan maupun yang sedang dalam proses penetapannya. Adapun status penetapan dan peraturan yang mengatur tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

NO	NAMA KAWASAN (KKP3K)	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN
1	KKPD Nusa Penida	Bali	Klungkung	20,057.00	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No.90/KEPMEN-KP/2018 mengganti KEPMENKP No. 24/KEPMEN-KP/2014
2	KKPD Buleleng	Bali	Buleleng	14,041.13	PENCADANGAN	KEPBUP Buleleng No. 523/630/HK/2011
3	KKPD Jembrana	Bali	Jembrana	3,532.52	PENCADANGAN	KEPBUP Jembrana No. 778/DKPK/2013 tanggal 30 Desember 2013
4	KKPD Karangasem	Bali	Karangasem	5,856.31	PENCADANGAN	KEPGUB BALI 375/03-L/HK/2017 tanggal 19 Januari 2017
5	KKM Teluk Benoa	Bali	Badung dan Denpasar	1,243.41	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No. 46/KEPMEN-KP/2019
6	KKPD di Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	Sidoarjo	72.32	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
7	KKPD di Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	Probolinggo	374.07	Sudah ditetapkan MKP	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN-KP/2020 tanggal 10 Juni 2020
8	KKPD di Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	Pasuruan	4073.74	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
9	KKPD di Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	Situbondo	123.181	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
10	KKPD di Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	Tulungagung	217	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
11	KKPD di Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	Sumenep	72026.14	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
12	KKPD di Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	Banyuwangi	412.68	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
13	TWP Gili Sulat dan Gili Lawang	N T B	Kab. Lombok Timur	10000	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 92/KEPMEN-KP/2018
14	TWP Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak	N T B	Kab. Lombok Barat	21132.82	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 93/KEPMEN-KP/2018

NO	NAMA KAWASAN (KKP3K)	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN
15	TWP Pulau Liang dan Ngali	N T B	Kab. Sumbawa	32644.43	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 20/KEPMEN-KP/2020
16	TWP Gili Banta	N T B	Kab. Bima	40276.54	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 21/KEPMEN-KP/2020
17	SAP Teluk Cempi	N T B	Kab. Dompu	22257.45	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 22/KEPMEN-KP/2020
18	TWP Teluk Bumbang	N T B	Kab. Lombok Tengah	6310	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
19	TPK Gili Balu	N T B	Kab. Sumbawa Barat	6005.2	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
20	TPK Pulau Kramat, Bedil dan Temudong	N T B	Kab. Sumbawa	2000	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
21	TP Penyu Tatar Sepang-Lunyak	N T B	Kab. Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat	72415.29	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
22	SAP Pulau Lipan dan Pulau Rakit	N T B	Kab. Sumbawa	26640.81	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
23	KKP3K Pulau Panjang	N T B	Kab. Sumbawa	22138.47	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
24	KKP Pulau Medang	N T B	Kab. Sumbawa	11339.56	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
25	KKP3K Pulau Kelapa	N T B	Kab. Bima	6947.28	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
26	KKP3K Pulau Sangiang	N T B	Kab. Bima	48610.01	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
27	KKPD Flores Timur	NTT	Flores Timur	150,000.00	Dicadangkan	Kep Gubernur No 308/KEP/HK/2017
28	KKPD Sikka	NTT	Sikka	207,062.92	Dicadangkan	Kep Gubernur No 107A/KEP/HK/2018
29	KKPD Lembata	NTT	Lembata	76,722.06	Dicadangkan	KepGub NTT nomor 192/Kep/HK/2019
30	KKPD SAP Selat Pantar	NTT	Alor	276,693.38	Ditetapkan	Kepmen KP Nomor 35/KEPMEN-KP/2015

PPKT adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan serta adanya ekosistem khas tropis dengan produktivitas hayati tinggi yaitu terumbu karang (coral reef), padang lamun (seagrass), dan hutan bakau (mangrove). Wilayah kerja BPSPL Denpasar memiliki 12 pulau-pulau kecil terluar dengan rincian:

- Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu
- Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Gili Sepatang (Pulau Sophialouisa)
- Provinsi Bali: Pulau Nusa Penida
- Provinsi Jawa Timur: Pulau Nusabarong (Pulau Barong), Pulau Ngekel (Pulau Sekel), dan Pulau Panikan

Selain menyimpan potensi yang besar, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menyimpan potensi bahaya yang dapat membawa bencana apabila kita kurang bijak dalam mengelolanya. Bencana ini tidak hanya yang terjadi secara alami, seperti gempa bumi dan tsunami, namun juga akibat ulah manusia dalam melakukan pembangunan seperti reklamasi atau alih fungsi lahan pesisir yang tidak ramah lingkungan.

1.7 Permasalahan dan Tantangan

BPSPL Denpasar memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Permasalahan dalam penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kendala ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dokumen pendukung. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap KKPD yang telah ditetapkan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan KKPD. Selain itu adanya permasalahan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang, pemanfaatan yang melebihi daya dukung, dan pencemaran. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan pengaturan pemanfaatan ruang pesisir dalam Rencana Zonasi
2. Monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang /zonasi. Diperlukan juga perizinan untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)
3. Pemanfaatan jenis ikan khususnya Hiu dan Pari masih tinggi dan merupakan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Wilayah kerja BPSPL Denpasar merupakan pintu ekspor Hiu dan Pari dengan jumlah dokumen sebanyak 2.412 dokumen sejak tahun 2017 – 2019 baik domestik maupun ekspor. Dalam hal ini BPSPL Denpasar terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kapasitas SDM, sarana prasarana pelayanan, serta pemenuhan kebutuhan data

dan informasi terkait pemanfaatan jenis ikan. Selain itu perlu adanya regulasi yang mengatur PNNP.

4. Belum adanya keseragaman data series keanekaragaman hayati laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar. Perlu adanya metode dan standard yang dibuat untuk pendataan.
5. Permasalahan terkait terumbu karang yaitu dijumpainya kelompok kapal penangkapan ikan yang melabuhkan jangkarnya di sekitar terumbu karang yang dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan terjadinya kasus penyakit pada terumbu karang. Perlu dilakukan monitoring dan sosialisasi secara berkala untuk menanggulangi dan mencegah semakin banyaknya kerusakan karang.
6. Aktivitas nelayan yang menambatkan kapal di sekitar padang lamun menyebabkan lamun dapat tergerus lunas kapal, selain itu ancaman tumpahan minyak hasil buangan kapal serta banyaknya suplai sedimen atau lumpur yang berasal dari daratan atau sungai yang bermuara ke laut yang dapat menyebabkan penempelan pada lamun yang dikhawatirkan mempengaruhi proses fotosintesis dimana dampaknya pada tingkat produktivitas primer yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisme.
7. Aktivitas *destructive fishing* yang masih terjadi di beberapa perairan di Wilayah kerja BPSPL Denpasar. Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada.
8. Sebaran potensi, dan kelompok masyarakat pengelola jasa kelautan belum teridentifikasi sepenuhnya. Selain itu, pendampingan terhadap keberlanjutan bantuan pemanfaatan jasa kelautan masih belum optimal.
9. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik. Perlu adanya peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.

1.8 Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2025 disusun dengan dasar hukum :

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan menginformasikan **Capaian Kinerja Pada Tahun Anggaran 2025**. Capaian Kinerja (*Performance Results*) pada Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif,

Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala selama triwulan II tahun 2025.

2. Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025 – 2029

Panduan strategis dalam merancang pembangunan nasional lima tahun ke depan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 yang memuat prioritas pembangunan yang bertujuan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan pengelolaan kelautan dan ruang laut diarahkan pada lima arah kebijakan ekonomi biru yang menjadi prioritas nasional, yaitu:

1. Perluasan Kawasan Konservasi Laut

Bertujuan melindungi keanekaragaman hayati laut dan menjaga kelestarian ekosistem kritis seperti terumbu karang, mangrove, dan lamun.

2. Penangkapan Ikan Secara Terukur Berbasis Kuota

Penangkapan ikan secara terukur diterapkan melalui sistem kuota yang berbasis pada prinsip keberlanjutan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga stok ikan agar tetap lestari, mencegah eksploitasi berlebihan serta meningkatkan produktivitas ekonomi sektor perikanan tangkap.

3. Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan

Perikanan budidaya dikembangkan dengan pendekatan berkelanjutan yang ramah lingkungan, menggunakan teknologi modern, dan mendorong efisiensi produksi.

4. Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan ruang laut dan pesisir yang efektif dioptimalkan untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mendukung pemanfaatan ruang laut yang tertib dan berkelanjutan. Pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan diperkuat untuk mengatasi potensi konflik pemanfaatan ruang serta melindungi ekosistem pesisir dari aktivitas merusak.

5. Pengendalian Sampah Plastik di Laut

Penanganan sampah plastik di laut akan menjadi prioritas dalam mendukung kebersihan ekosistem laut dan pesisir. Melalui pendekatan hulu ke hilir, mencakup pengurangan sumber plastik dari darat,

optimalisasi pengelolaan limbah, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan laut.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Penetapan kinerja tahun 2025 menggunakan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan di"*cascading*" (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Dengan metode atau pendekatan *Balance Score Card*, telah dilakukan restrukturisasi SAKIP KKP dimulai dari level Renstra kementerian sampai dengan level monitoring dan pengukuran kinerja. Dalam upaya mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK), BPSPL Denpasar menguraikan penjabaran visi misi yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Denpasar berpedoman pada sasaran kegiatan yang diturunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran. Dalam perkembangannya, perjanjian kinerja BPSPL Denpasar sampai dengan Triwulan IV mengalami penyesuaian sebanyak dua kali. Perjanjian Kinerja awal disahkan pada tanggal 24 Januari 2025. Kemudian dilakukan perubahan pertama dan disahkan pada Juni 2025 dan perubahan kedua disahkan pada 31 Desember 2025. Adapun perubahan yang dilakukan antara lain:

- Pemisahan perjanjian kinerja Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut yaitu pada Indikator Kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)
- Penambahan Indikator Kinerja Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai) pada perjanjian kinerja Kepala BPSPL Denpasar dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
- Pada perubahan kedua dilakukan penambahan anggaran dengan sumber dana PNPB dengang total penambahan Rp11.029.054.000,-. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	1.	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	1
2.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	30
3.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
4.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)	80
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
6.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	6.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	2

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar	7.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	70
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	89
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	71,5
		10.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
		11.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (Indeks)	80
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Denpasar (%)	95
		13.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		15.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	80
		16.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	76
		17.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Denpasar (Nilai)	91

2.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2025

Pemanfaatan informasi kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar merupakan bagian penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Informasi kinerja Tahun 2025 dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam penyusunan perencanaan kinerja dan penganggaran tahun berikutnya. Capaian indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun sasaran kegiatan, dianalisis untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang telah berjalan efektif serta yang masih memerlukan perbaikan.

Informasi kinerja dimanfaatkan sebagai alat pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Rapat monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala yaitu setiap tiga bulan (Triwulan) dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kendala, permasalahan, serta faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, langkah-langkah korektif dapat segera dilakukan guna memastikan pencapaian target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Capaian dan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 dimanfaatkan sebagai dasar dalam upaya peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, pemanfaatan informasi kinerja Tahun 2025 di BPSPL Denpasar telah dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dalam siklus manajemen kinerja. Pemanfaatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas kinerja dalam mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan.

2.4 Keselarasan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 – 2029, Rencana Kerja 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Keselarasan antara Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Direktorat Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan wujud komitmen organisasi dalam menerapkan manajemen kinerja yang terintegrasi dan berkesinambungan. Keselarasan ini memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BPSPL Denpasar berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengelolaan Kelautan.

Renstra Sekretariat Jenderal Direktorat Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 menjadi pedoman utama dalam penetapan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis pengelolaan kelautan. Sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh BPSPL Denpasar ke dalam sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi balai, khususnya dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja BPSPL Denpasar Tahun 2025 disusun dengan mengacu secara langsung pada Renstra Sekretariat Jenderal Direktorat Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029. Rencana kerja memuat program, kegiatan, serta target kinerja tahunan yang merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Renstra. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas strategis yang ditetapkan dalam Renstra.

Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen kinerja antara Kepala BPSPL Denpasar dengan atasan langsung. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, serta target yang secara konsisten mengacu pada sasaran dan indikator yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2025. Dengan demikian, terdapat kesinambungan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja.

Keselarasan antara Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja ini memungkinkan pengendalian dan evaluasi kinerja dilakukan secara efektif. Capaian kinerja yang diukur dalam Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam penilaian keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis Renstra. Hal ini juga mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berorientasi pada hasil.

Dengan terwujudnya keselarasan Renstra Sekretariat Jenderal Direktorat Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan BPSPL Denpasar dapat berjalan secara terarah, efektif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Denpasar BPSPL Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja BPSPL Denpasar terdiri dari 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja (IK). Pada Tahun 2025 Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS) IKU+IKM diperoleh nilai 106,07 (baik).



Gambar 2. Nilai Perolehan Sasaran Strategis BPSPL Denpasar

Tabel 7. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Frekuensi Perhitungan	Tahun 2025		%Kinerjaku
			Target	Capaian	
1	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	Tahun	1,00	1,00	100
2	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	Tahun	30,00	30,00	100

No	Indikator Kinerja Utama	Frekuensi Perhitungan	Tahun 2025		%Kinerjaku
			Target	Capaian	
3	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	Tahun	5,00	7,00	120
4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	80,00	90,00	112
5	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	Tahun	1,00	1,00	100
6	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	Tahun	2,00	2,00	100
7	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	70,00	86,90	120
8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	89,00	94,11	105
9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	71,50	97,86	120
10	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	Triwulan	4,00	4,00	100

No	Indikator Kinerja Utama	Frekuensi Perhitungan	Tahun 2025		%Kinerjaku
			Target	Capaian	
11	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (Indeks)	Semester	80,00	86,85	108
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Denpasar (%)	Triwulan	95,00	87,00	91
13	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	Tahun	100,00	100,00	100
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	75,00	87,57	116
15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	80,00	86,11	107
16	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	Triwulan	76,00	100,00	120
17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	91,00	100,00	109

3.2 Evaluasi atas Capaian Kinerja Tahun 2025

IK 1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)

Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah adalah Provinsi yang didampingi dan difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Formulasi perhitungan yaitu dengan menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar yang didampingi dalam proses penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah.

Tabel 8.Capaian IK 1 BPSPL Denpasar

SK 1 Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar								
IK 1	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)							
Tahun 2024	Tahun 2025							
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK	Target Renstra 2029	% Realisasi Thd Renstra 2029
-	1	1	100	100	1	100	-	-

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi) telah tercapai 1 Provinsi dari target 1 Provinsi (100%) yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja ini antara lain: Dukungan Operasional dan Pendampingan Pelaksanaan Proyek LAUTRA, Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor, Respon Cepat Penanganan Biota Perairan di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor, Penjangkauan Stakeholder Kawasan Konservasi di Perairandi Kepulauan Alor, Fasilitasi Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor, dan Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor. Uraian masing-masing kegiatan tercantum dalam poin Kegiatan Pendukung.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat Indikator Kinerja Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi

Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi).

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Capaian tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena satuan target pada Indikator Kinerja Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar adalah Provinsi sedangkan pada Renstra indikator ini mendukung sasaran program Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola dengan satuan Juta Hektar. Adapun Kawasan yang dikelola di wilayah BPSPL Denpasar dalam hal ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur di wilayah Kepulauan Alor dengan luas 277.072 Hektar.

D. Analisis Keberhasilan

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai fasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar khususnya dalam realisasi kegiatan. Adapun kendala pada kegiatan ini adalah terdapat blokir anggaran dan kebijakan internal Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang penundaan sementara kegiatan *Oceans for Prosperity Project* - LAUTRA serta adanya perubahan kantor bayar sehingga perlu melakukan koreksi kantor bayar yang semula KPPN Denpasar (037) menjadi KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140) dan proses tersebut memerlukan waktu. Namun, semua kendala tersebut dapat teratasi dan kegiatan berjalan dengan baik.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar lembaga terkait baik yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau pusat dalam pelaksanaan kegiatan secara daring dan luring untuk kegiatan *Oceans for Prosperity Project* - LAUTRA.

F. Kegiatan Pendukung

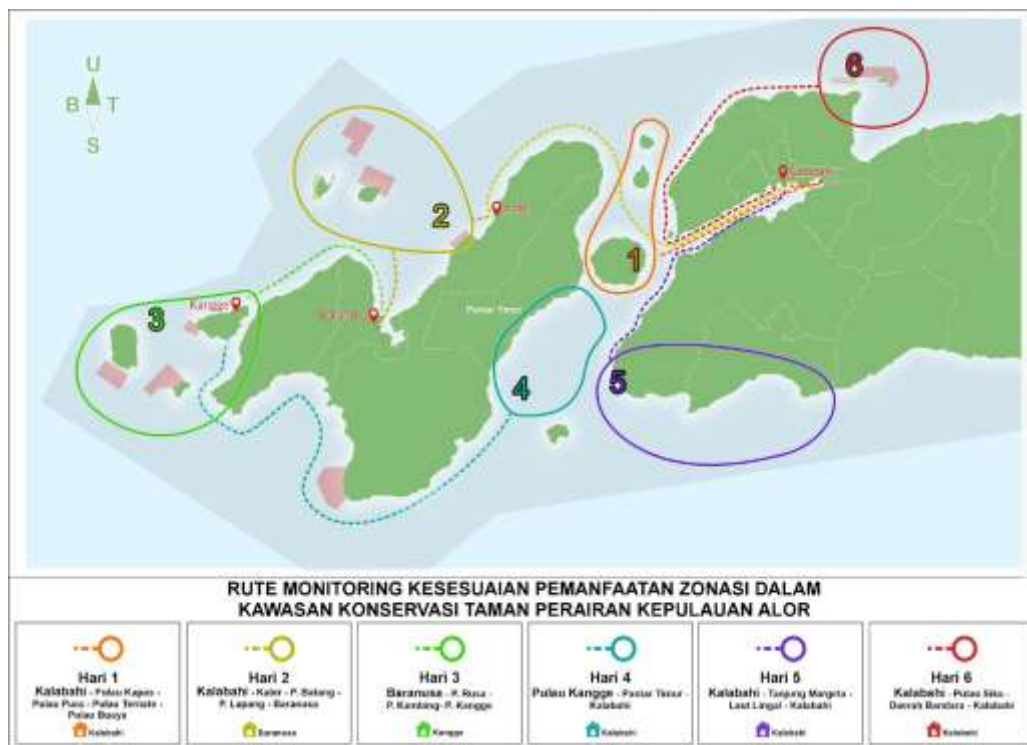
Kegiatan pendukung pada IK Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi) antara lain:

1. Dukungan Operasional dan Pendampingan Pelaksanaan Proyek LAUTRA

Kegiatan Dukungan Operasional dan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan LAUTRA telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya serta memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran implementasi Proyek LAUTRA Tahun Anggaran 2025 melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan koordinasi, evaluasi, dan pendampingan teknis.

2. Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

Salah satu bentuk upaya yang menjadi perhatian dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah melakukan pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi untuk menurunkan ancaman dan meningkatkan kepatuhan dalam pemanfaatan di dalam kawasan konservasi. Hal ini juga yang menjadi tindak lanjut dan rekomendasi penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya. Oleh karena itu, melalui program LAUTRA, BPSPL Denpasar berupaya memfasilitasi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor untuk melakukan monitoring kesesuaian zonasi dalam kegiatan pemanfaatan di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Gambar 3. Lokasi Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

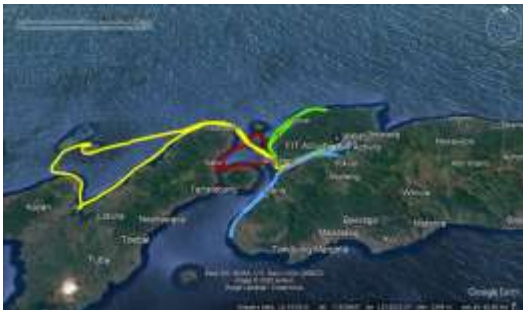
Monitoring dilaksanakan dalam 4 tahap dan telah menjangkau seluruh kawasan konservasi atau 100% dari total luas kawasan. Adapun rincian monitoring aktivitas pemanfaatan dan kesesuaian zonasi kawasan konservasi di perairan di Kepulauan Alor tersaji pada Tabel 9.

Tabel 9. Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

Tanggal	Rute Tempuh	Area yang Dijangkau
14 – 23 September 2025 (Tahap I)	391,20 Km	Hari Pertama: Kalabahi – Pulau Pura – Pulau Ternate – Pulau Buaya – Kalabahi Hari Kedua: Kalabahi – Pulau Lapang – Pulau Batang – Baranusa – Kalabahi Hari Ketiga: Kalabahi – Alor Kecil – Alor Besar – Batu Putih – Kalabahi Hari Keempat: Kalabahi Tanjung Gereja – Abad - Kalabahi
13 – 24 Oktober 2025 (Tahap II)	989,20 Km	Hari Pertama: Kalabahi – Alor Kecil - Pulau Ternate - Pantar Utara – Pulau Kangge - Pulau Lapang - Pulau Rusa - Pulau Kangge - Pantar Utara – Pulau Ternate - Alor Kecil – Kalabahi Hari Kedua: Kalabahi – Alor Kecil - Pulau Ternate - Pantar Utara – Pulau Ternate - Pulau Pura bagian utara - Alor Kecil – Kalabahi Hari Ketiga: Kalabahi – Alor Kecil - Pulau Ternate - Pantar Utara - Desa Kabir - Desa Pandai - Desa Munaseli - Pulau Ternate - Alor Kecil – Kalabahi Hari Keempat:

Tanggal	Rute Tempuh	Area yang Dijangkau
		Kalabahi – Pesisir Desa Halerman - Pesisir Desa Mawar - Utara Pulau Ternate - Alor Kecil - Timur Pulau Pura – Kalabahi Hari Kelima: Kalabahi - Pesisir Desa Margeta - Utara Pulau Trewang – Barat Pulau Pura - Alor Kecil – Kalabahi Hari Keenam: Kalabahi - Alor Kecil - Pulau Sika - Pesisir Desa Adang – Alor Kecil – Kalabahi Hari Ketujuh: Kalabahi - Alor Kecil - Pulau Ternate - Pulau Pura - Alor Kecil - Pulau Buaya - Barat Pulau Ternate - Alor Kecil – Kalabahi Hari Kedelapan: Kalabahi - Alor Kecil - Pulau batang - Pulau lapang - Pelabuhan Baranusa - Alor Kecil - Kalabahi
17 – 24 November 2025 (Tahap III)	413,64 Km	Hari Pertama: Kalabahi – Pulau Buaya - Pulau Ternate - Pulau Pura – Pulau Kapas – Kalabahi Hari Kedua: Kalabahi – Alor Kecil - Pulau Pura - Pulau Ternate – Kalabahi Hari Ketiga: Kalabahi – Alor Kecil - Pulau Kepa – Pulau Pura – Pulau Buaya - Pulau Ternate - Pulau Kapas – Kalabahi Hari Keempat:

Tanggal	Rute Tempuh	Area yang Dijangkau
		Kalabahi – Alor Kecil - Alor Besar - Pulau Sikka - Alor Besar - Alor Kecil – Kalabahi Hari Kelima: Kalabahi – Pantai Mali – Pulau Sikka - Kalabahi
11 -19 Desember 2025 (Tahap IV)	490,72 Km	Hari Pertama: Kalabahi – Pulau Treweng – Souyang - Pulau Pura – Alor Kecil – Kalabahi Hari Kedua: Kalabahi – Pulau Sikka - Alor Kecil – Kalabahi Hari Ketiga: Kalabahi – Pulau Batang - Pulau Lapang – Kalabahi Hari Keempat: Kalabahi – Pulau Pura – Pulau Ternate – Pulau Buaya - Alor Kecil – Kalabahi





Gambar 4. Rute Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

Hasil dari kegiatan monitoring aktivitas pemanfaatan dan kesesuaian zonasi kawasan konservasi di perairan di Kepulauan Alor antara lain: ditemukan aktivitas penangkapan ikan dan penempatan alat bantu penangkapan ikan, budi daya mutiara, pariwisata alam perairan, transportasi untuk pelayaran rakyat, pelayaran kapal penumpang, pelayaran kapal barang, dan penempatan infrastruktur laut berupa pelabuhan dan dermaga. Aktivitas pemanfaatan banyak dilakukan di zona pemanfaatan terbatas. Aktivitas yang tidak sesuai dengan zonasi di Taman Perairan Kepulauan Alor antara lain penangkapan ikan oleh nelayan tradisional di zona inti, pelayaran rakyat di zona inti, dan penangkapan ikan di zona lain (zona pelabuhan).

3. Respon Cepat Penanganan Mamalia Terdampar di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

Kegiatan ini dengan melakukan penanganan biota laut dilindungi terdampar hidup atau mati secara tanggap di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor serta meningkatkan pengetahuan stakeholder di Kawasan Konservasi Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dalam melakukan penanganan biota perairan dilindungi yang terdampar secara cepat, tepat dan aman. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Melaksanakan Bimbingan Teknis Penanganan Biota Perairan Terdampar (*First Responder*) pada tanggal 11 – 12 November 2025 di Hotel Simfony Alor
- Melaksanakan respon cepat mamalia laut yaitu lumba-lumba terdampar tanggal 6 Desember 2025

4. Penjangkauan Stakeholder Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

BPSPL Denpasar membantu pendampingan pengelolaan kawasan konservasi di Kepulauan Alor melalui kegiatan penjangkauan, diharapkan dapat menjadi sarana penyadartahuan, pemberian informasi, dan penguatan pelibatan masyarakat yang berada di Kawasan Perairan di Kepulauan Alor.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi penunjang dalam kegiatan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan peran Masyarakat dan isu-isu berkembang yang terdapat pada kalangan stakeholder yang berada pada kawasan konservasi untuk selanjutnya informasi dan data yang diperoleh dapat diolah untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang dapat menunjang perkembangan dan kemajuan Kawasan Konservasi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu kawasan konservasi dalam mempertahankan Nilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Rapat koordinasi pembahasan bahan ajar mengenai Kawasan konservasi untuk jenjang SMP dan SMA tanggal 23 Oktober 2025 di Hotel Harper Kupang dan tanggal 27 November 2025 di Hotel Simfony Alor
- Penjangkauan *stakeholder* dalam rangka LAUTRA: *Empowering Youth* 2025 pada tanggal 24 November 2025 di SMA Negeri 2 Kalabahi, Kab. Alor
- Forum keterlibatan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penjangkauan Stakeholder Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Alor tanggal 25 November 2025 di Hotel Simfony Alor
- Kemitraan strategis pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penjangkauan Stakeholder Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Alor tanggal 26 November 2025 di Hotel Simfony Alor
- Publikasi kegiatan dan pemberian bahan sosialisasi



Gambar 5. Penjangkauan Stakeholder Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Alor

5. Fasilitasi Persiapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

Tujuan dari kegiatan ini adalah memfasilitasi UPTD bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga dengan adanya BLUD layanan umum menjadi lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

Dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah dibidang konservasi yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah sebagai penanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Koordinasi dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Regulasi Operasionalisasi Penerapan BLUD tanggal 1 – 4 September 2025 di Kupang, tanggal 29 September 2025 di Alor
- Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur terkait BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya tanggal 30 September 2025 di Kupang
- Rapat koordinasi kelompok kerja pembahasan draft Regulasi Penerapan BLUD pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya tanggal 21 – 22 Oktober 2025 di Kupang
- Konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa konsultasi draft regulasi penerapan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya tanggal 18 – 20 November 2025 di Jakarta
- Konsultasi publik dan/atau sosialisasi rancangan peraturan Gubernur Regulasi Penerapan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya tanggal 27 November 2025 dan 18 – 19 Desember 2025 di Alor

6. Sarana dan Prasarana untuk Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

Salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh tim penilai EVIKA Tahun 2024 kepada SUOP/UPTD dan/atau Pemerintah Daerah untuk peningkatan skor EVIKA pada tahun-tahun berikutnya adalah melengkapi sarana dan prasarana pengelolaan.

Untuk mencapai hal tersebut maka BPSPL Denpasar melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelola kawasan di wilayah kawasan konservasi lokasi proyek Lautra di wilayah kerja BPSPL Denpasar yaitu di Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Alor Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapan dan kapasitas operasional unit pengelola kawasan konservasi dalam menjalankan fungsi perlindungan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana diukur melalui Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Dengan tersedianya peralatan dan infrastruktur pendukung yang memadai, pengelola kawasan diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pemantauan, pengawasan, pendataan, serta pelayanan pemanfaatan kawasan secara lebih sistematis, terukur, dan berbasis bukti, sehingga kualitas pengelolaan kawasan konservasi di Kepulauan Alor dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Penyediaan Sarana dan Prasarana pada tahun 2025 tersaji pada Tabel 10.

Tabel 10. Sarana dan Prasarana untuk Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Fungsi Utama	Kontribusi terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi	Dokumentasi
1	Dive Computer	9 unit	Pengukuran waktu, kedalaman, dan keselamatan penyelaman	Mendukung kegiatan monitoring biofisik terumbu karang secara akurat dan aman	

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Fungsi Utama	Kontribusi terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi	Dokumentasi
2	Alat selam	15 set	Fasilitasi penyelaman tim monitoring	Memperluas cakupan dan frekuensi pemantauan kondisi ekosistem	
3	Container box	4 unit	Penyimpanan dan pengamanan peralatan	Menjaga kelayakan dan umur pakai peralatan	
4	Hanger alat selam	20 unit	Pengeringan dan penyimpanan alat selam	Meningkatkan perawatan dan kesiapan alat	

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Fungsi Utama	Kontribusi terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi	Dokumentasi
5	Stand hanger	2 unit	Penataan peralatan selam	Mendukung tata kelola logistik peralatan	 21 Dec 2025 at 10:55:13 8° 36' 3", E 115° 19' 34" Altitude: 11.0 meter
6	GPS	5 unit	Penentuan posisi dan pemetaan lapangan	Mendukung pengawasan zonasi dan survei kawasan	 21 Dec 2025 at 13:38:36 8° 36' 2" S, 115° 19' 33" E Professor Ida Bagus Mantra Bypass Ganyar Bali
7	Komputer	5 unit	Pengolahan data dan pelaporan	Memperkuat administrasi dan sistem informasi pengelolaan	 21 Dec 2025 at 14:04:44 8° 36' 2" S, 115° 19' 33" E Professor Ida Bagus Mantra Bypass Ganyar Bali Indonesia Altitude: 22.2 meter Speed: 0.0 km/h

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Fungsi Utama	Kontribusi terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi	Dokumentasi
8	Printer	5 unit	Pencetakan laporan dan dokumen	Mendukung dokumentasi dan pelaporan resmi	
9	Kamera GoPro	2 unit	Dokumentasi bawah air	Bukti visual kondisi ekosistem dan aktivitas lapangan	
10	Drone	1 unit	Pemantauan kawasan dari udara	Memperkuat pengawasan aktivitas pemanfaatan kawasan	

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Fungsi Utama	Kontribusi terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi	Dokumentasi
11	Drone Flymore Kit	2 set	Aksesori dan cadangan operasional drone	Menjamin keberlanjutan operasi pengawasan udara	 21 Dec 2025 at 13:27:55 8° 36' 2" S, 115° 19' 33" E Profesor Ida Bagus Mantra Bypass Ganyar Bali
12	Drone Battery	1 set	Daya cadang drone	Memperpanjang waktu operasi pemantauan	 21 Dec 2025 at 13:27:55 8° 36' 2" S, 115° 19' 33" E Profesor Ida Bagus Mantra Bypass Ganyar Bali
13	Echosounder	1 unit	Pengukuran kedalaman dan struktur dasar laut	Mendukung analisis habitat dan daya dukung	 21 Dec 2025 at 13:17:32 8° 36' 2" S, 115° 19' 33" E Profesor Ida Bagus Mantra Bypass Ganyar Bali

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Fungsi Utama	Kontribusi terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi	Dokumentasi
14	Kamera Logitech Rally	1 unit	Konferensi dan dokumentasi rapat	Mendukung koordinasi dan pengambilan keputusan	
15	Microphone wireless meja	2 set	Audio rapat dan diskusi	Memperkuat komunikasi dan dokumentasi	
16	Alat pengukur kualitas air	2 unit	Pengukuran parameter kualitas air	Mendukung penilaian kesehatan ekosistem	

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Fungsi Utama	Kontribusi terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi	Dokumentasi
17	Digital interactive board	1 unit	Presentasi dan analisis data	Mendukung evaluasi dan pelaporan kinerja	
18	Genset	1 unit	Cadangan listrik operasional	Menjamin kelangsungan operasional lapangan	
19	AC 0,5 PK	2 unit	Pendingin ruangan	Meningkatkan kenyamanan kerja petugas	

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Fungsi Utama	Kontribusi terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi	Dokumentasi
20	AC 1 PK	2 unit	Pendingin ruangan	Mendukung produktivitas pengelola	
21	Pencetak ID Card	1 unit	Identifikasi petugas dan pengunjung	Mendukung pengendalian akses dan pelayanan	
22	Scanner barcode	2 unit	Verifikasi identitas dan akses	Mendukung sistem pelayanan dan pengawasan	

G. Rencana Aksi Tahun 2026

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan, BPSPL Denpasar pada Tahun 2026 tidak lagi mengelola kawasan di wilayah Nusa Tenggara Timur namun akan melanjutkan pengelolaan kawasan di wilayah Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, serta wilayah Laut Sulawesi oleh karena itu rencana aksi pada tahun 2026 adalah perlunya penyesuaian dan koordinasi yang intens baik antar pegawai dan stakholder dalam mengelola kawasan tersebut.

IK 2. Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)

Masyarakat di kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan kawasan konservasi adalah masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi peningkatan kapasitas dalam pemanfaat kawasan konservasi melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan pengelola masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar. Jumlah peserta dihitung berdasarkan orang dan jenis kegiatan pelatihan/bimtek yang dilakukan.

Tabel 11. Capaian IK 2 BPSPL Denpasar

SK 2 Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar								
IK 2		Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)						
Tahun 2024		Tahun 2025						
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK	Target Renstra 2029	% Realisasi Thd Renstra 2029
25	30	30	100	-	30	100	-	-

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang) adalah 30 orang dari target 30 orang (100%). Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan dan sertifikasi selam SCUBA serta pelatihan dan sertifikasi penilai kondisi terumbu karang dengan jumlah total 30 orang yang terdiri dari masyarakat dan pengelola kawasan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 sama dengan capaian kinerja tahun 2024 sehingga tidak ada kenaikan yang signifikan pada tahun berjalan. Sama sama memperoleh capaian 100%. Tahun 2024 target 25 orang tercapai 25 orang. Begitu juga tahun 2025 target 30 orang tercapai 30 orang.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Capaian tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena satuan target pada Indikator Kinerja Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar adalah Orang sedangkan pada Renstra indikator ini mendukung sasaran program Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola dengan satuan Juta Hektar. Adapun Kawasan yang dikelola di wilayah BPSPL Denpasar dalam hal ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur di wilayah Kepulauan Alor dengan luas 277.072 Hektar.

D. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar khususnya pada kegiatan peningkatan dalam realisasi kegiatan. Adapun kendala pada kegiatan ini adalah terdapat blokir anggaran dan kebijakan internal Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang penundaan sementara kegiatan *Oceans for Prosperity Project* – LAUTRA. Dimana untuk mendukung kegiatan ini menggunakan sumber dana Pinjaman Luar Negeri (PLN). Kendala lainnya adalah adanya perubahan kantor bayar sehingga perlu melakukan koreksi kantor bayar yang semula KPPN Denpasar (037) menjadi KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140) dan proses tersebut memerlukan waktu. Namun, semua kendala tersebut dapat teratasi dan kegiatan berjalan dengan baik dan mencapai target.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar Lembaga, *stakeholder*, serta masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan kegiatan baik secara daring dan luring untuk kegiatan pelatihan dan sertifikasi selam SCUBA serta pelatihan dan sertifikasi penilai kondisi terumbu karang.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar adalah Penguatan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor merupakan salah satu wilayah dengan biodiversitas laut tertinggi di Indonesia, mencakup ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove, serta keberadaan berbagai megafauna laut. Keindahan bawah laut tersebut telah menarik ribuan wisatawan untuk datang ke Alor dan menyelam sehingga Alor dikenal sebagai destinasi wisata selam dengan sebaran 79 titik selam (dive spot). Terumbu karang menjadi sumber daya utama (target konservasi) bagi kelangsungan Kawasan Konservasi Alor. Salah satu bentuk penjagaannya adalah terpantaunya kondisi terumbu karang secara periodik. Data tersebut menjadi salah satu dasar penentuan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi. Ketersediaan personil SUOP yang memiliki kompetensi menilai kondisi terumbu karang dan tersedianya data kondisi terumbu karang merupakan butir-butir penting dalam pemenuhan komponen nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Adapun pelaksanaan kegiatan menjadi dua tahap, yaitu:

- Pelatihan dan Sertifikasi Selam SCUBA di Alor dengan peserta sejumlah 22 orang
- Pelatihan dan Sertifikasi Penilai Kondisi Terumbu Karang di Kab. Karangasem dengan peserta sejumlah 8 orang





Gambar 6. Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi

G. Rencana Aksi Tahun 2026

- Koordinasi dengan stakeholder/lembaga terkait
- Perumusan peningkatan kapasitas masyarakat yang sesuai di tahun 2026
- Kegiatan pada tahun 2026 akan mendukung indikator kinerja jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya perlindungan

IK 3. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)

Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatan secara berkelanjutan atau jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatan dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES, serta *look a like species* seperti Hiu, Pari, *Soft Coral*, Banggai Cardinal Fish dan Teripang.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES, serta *look a like spesies* yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 12. Capaian IK 3 BPSPL Denpasar

SK 3 Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar								
IK 3		Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)						
Tahun 2024		Tahun 2025						
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK	Target Renstra 2029	% Realisasi Thd Renstra 2029
6	5	7	140	20	5	140	460	1

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) adalah tercapai 7 jenis dari target 5 jenis (140%). Adapun jenis ikan yang dilayani oleh Balai Pengelolaan Pesisir dan Laut Denpasar pada tahun 2025 antara lain: hiu, pari, ikan capungan banggai (*Banggai Cardinal Fish*), teripang, *soft coral*, arwana, dan sidat.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 mengalami kenaikan 20% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Pada tahun 2024 dari target 5 jenis tercapai 6 jenis (120%) dan pada tahun 2025 dari target 5 jenis tercapai 7 jenis (140%). Kenaikan capaian ini dikarenakan jumlah jenis yang dilayani oleh BPSPL Denpasar di tahun 2025 bertambah yaitu jenis sidat.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Capaian kinerja Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Renstra adalah BPSPL Denpasar mendukung sejumlah 1% capaian dari target Renstra. Adapun perolehan seluruh target merupakan capaian kumulatif dari seluruh Unit Pelaksana Teknis dan Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

D. Analisis Keberhasilan

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Denpasar khususnya komitmen masing-masing pegawai dalam melayani pelaku usaha sehingga penerbitan dokumen angkut seluruh jenis yang dimohonkan dapat dilayani dengan baik.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar lembaga terkait baik yang berada di seluruh wilayah kerja BPSPL Denpasar dan/atau pusat baik secara daring maupun luring. Selain itu menjalin hubungan yang baik kepada pelaku usaha atau pengguna jasa guna meningkatkan kualitas layanan BPSPL Denpasar.

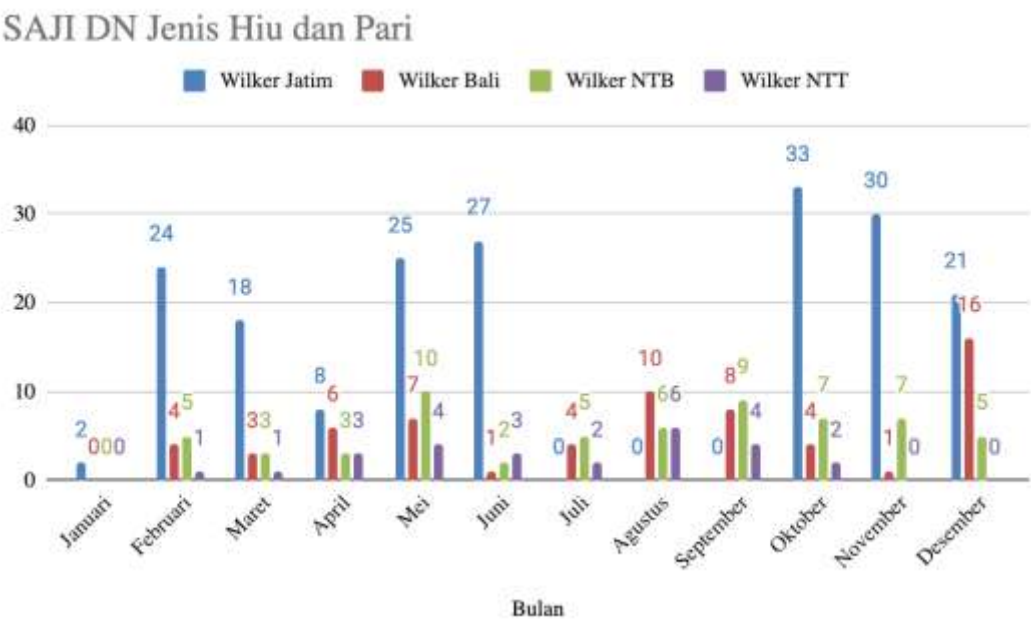
F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) adalah kegiatan Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES. Pelaksanaan pelayanan jenis ikan dilakukan secara daring dan luring.

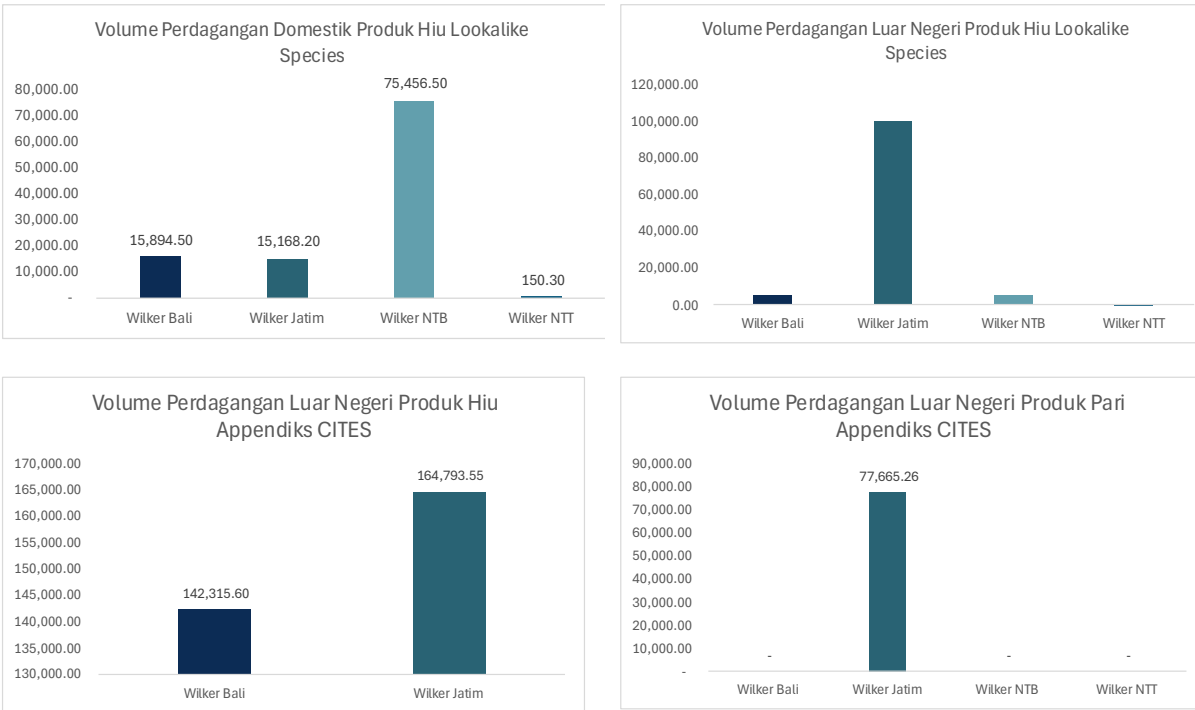
Adapun rincian jenis ikan yang dilayani oleh BPSPL Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Hiu

BPSPL Denpasar melakukan penerbitan dokumen lalu lintas jenis ikan berupa SAJI DN hiu dan pari. Adapun dokumen lalu lintas terbit tersaji pada Gambar.



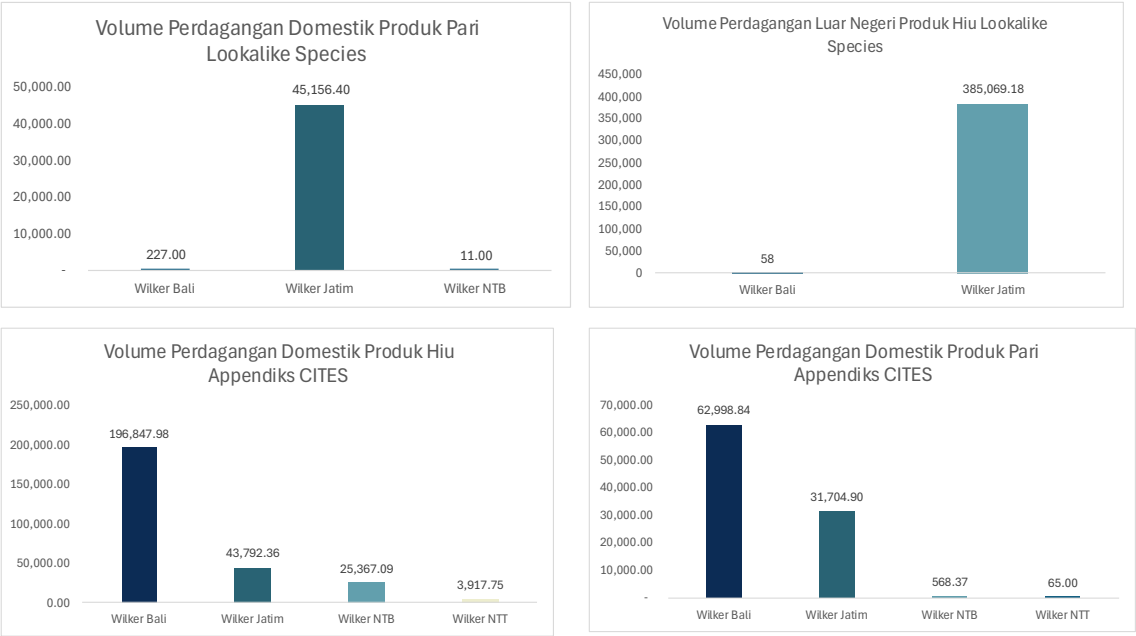
Gambar 7. Dokumen SAJI DN Hiu dan Pari Terbit Tahun 2025



Gambar 8. Perdagangan Hiu BPSPL Denpasar Tahun 2025

2. Pari

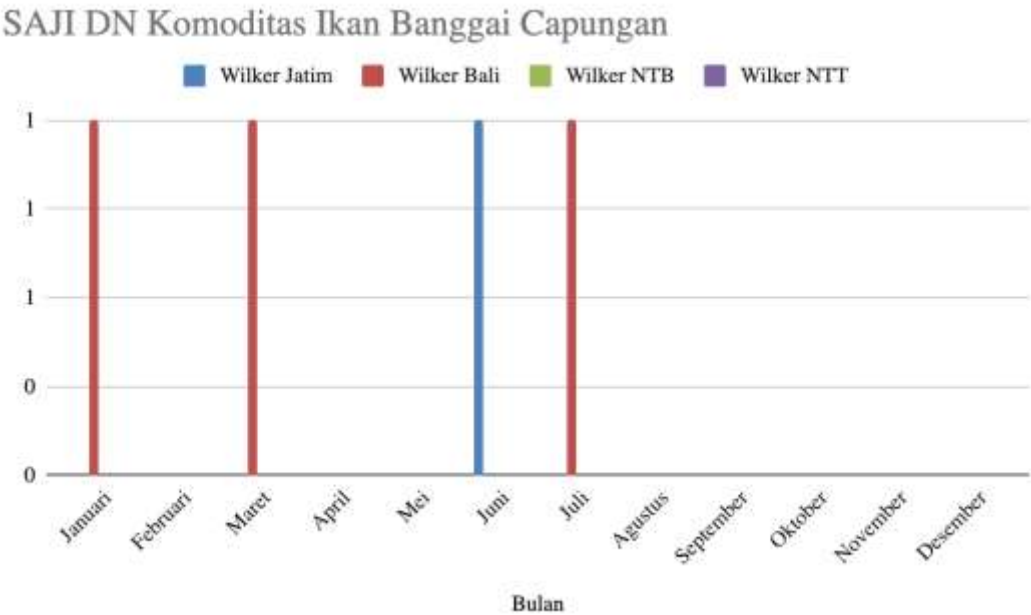
BPSPL Denpasar melakukan penerbitan dokumen lalu lintas jenis ikan berupa SAJI DN hiu dan pari. Penerbitan dokumen lalu lintas SAJI DN berada di wilayah kerja Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Adapun volume perdagangan jenis pari di BPSPL Denpasar Tahun 2025 tersaji pada Gambar.



Gambar 9. Perdagangan Pari BPSPL Denpasar Tahun 2025

3. Banggai Cardinal Fish

BPSPL Denpasar melakukan penerbitan dokumen lalu lintas jenis ikan capungan banggai selama tahun 2025. Rincian penerbitan SAJI DN arwana tersaji pada Gambar 7.



Gambar 10. Dokumen SAJI DN Banggai Cardinal Fish Terbit Tahun 2025

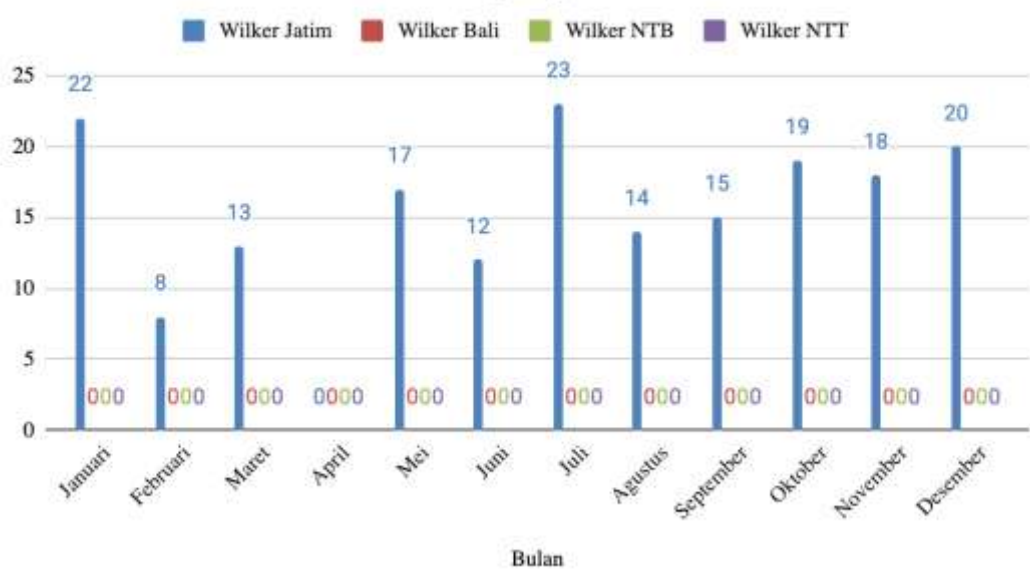
4. Teripang

BPSPL Denpasar melakukan penerbitan dokumen lalu lintas jenis teripang berupa rekomendasi baik dalam negeri maupun luar negeri dengan rincian sebagaimana tersaji pada Gambar.



Gambar 11. Dokumen Rekomendasi DN Teripang Terbit Tahun 2025

Rekomendasi LN Komoditas Teripang TA 2025

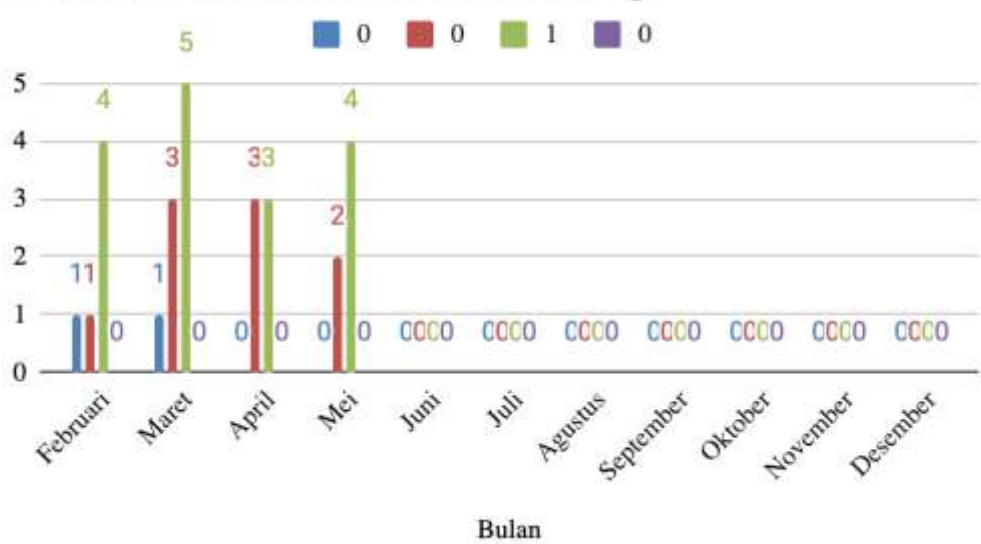


Gambar 12. Dokumen Rekomendasi LN Teripang Terbit Tahun 2025

5. Soft Coral

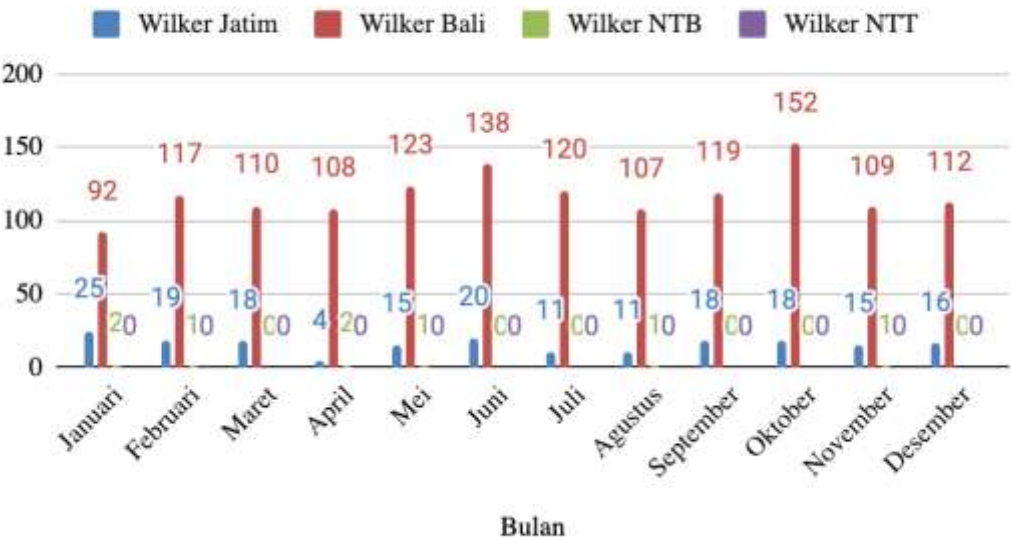
BPSPL Denpasar melakukan penerbitan dokumen lalu lintas jenis karang hias (Soft Coral, Anemone, dan Artificial Live Rock) sebagaimana tersaji pada Gambar.

Penerbitan Rekomendasi DN Karang



Gambar 13. Dokumen Rekomendasi SAA Terbit Tahun 2025

Penerbitan Rekomendasi LN Karang

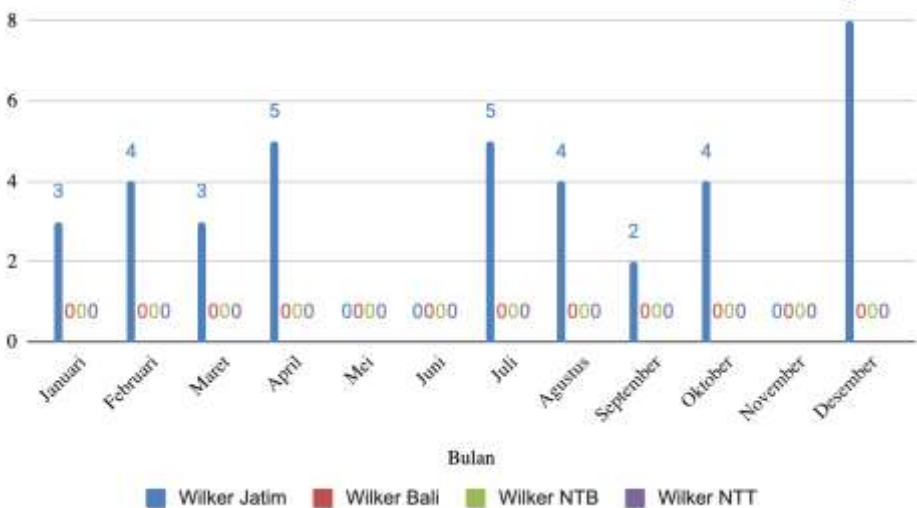


Gambar 14. Dokumen Rekomendasi SAA Terbit Tahun 2025

6. Arwana

BPSPL Denpasar melakukan penerbitan dokumen lalu lintas jenis arwana selama tahun 2025 telah terbit 38 dokumen SAJI DN. Rincian penerbitan SAJI DN arwana tersaji pada Gambar.

Jumlah SAJI DN Arwana TA 2025

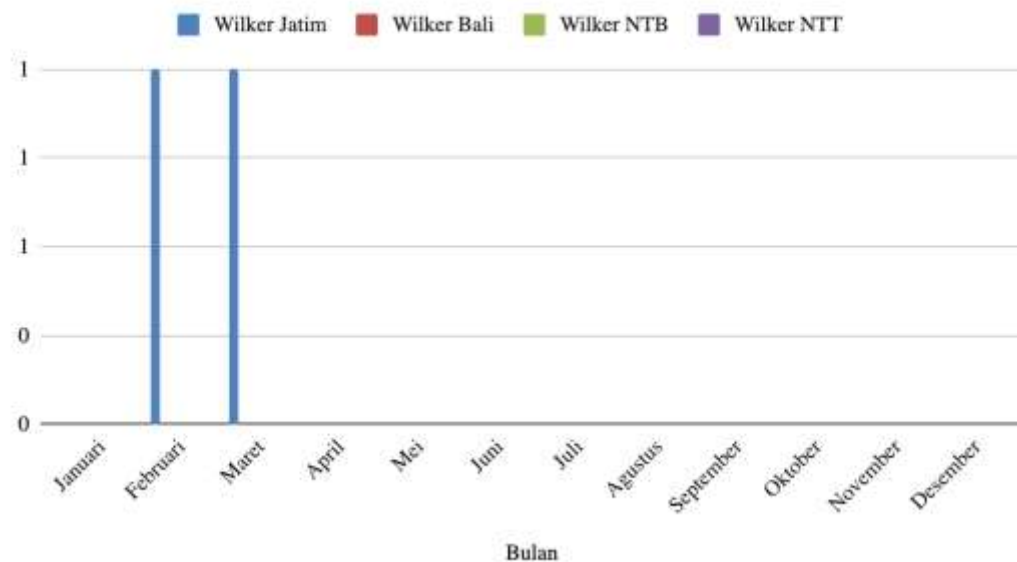


Gambar 15. Dokumen SAJI DN Arwana Terbit Tahun 2025

7. Sidat

BPSPL Denpasar melakukan penerbitan dokumen lalu lintas jenis sidat yang seluruhnya diterbitkan oleh BPSPL Denpasar wilayah kerja Jawa Timur. Adapun dokumen SAJI DN jenis sidat terbit tersaji pada Gambar 8.

Penerbitan SAJI DN Komditas Sidat



Gambar 16. Dokumen SAJI DN Sidat Terbit Tahun 2025

Kegiatan pendukung lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelayanan Jenis Ikan yang Dimanfaatkan secara berkelanjutan meliputi:

- Verifikasi permohonan penerbitan Berita Acara SIPJI (Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan)

Salah satu kegiatan utama pelayanan di BPSPL Denpasar, adalah kegiatan verifikasi lapang atas permohonan penerbitan BA SIPJI pelaku usaha di wilayah kerja BPSPL Denpasar. Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, SOP Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko mekanisme Hak Akses Turunan, Nomor 09/DJPRL.2/OT.310/IX/2022 tanggal 28 Agustus 2022, dan juga SOP yang dikeluarkan BPSPL Denpasar B.3048/BPSPL.4/OT.3/VII/2025 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lapang Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan. Kegiatan ini dilaksana sepanjang tahun 2025 berdasarkan permohonan dari pelaku usaha. Adapun pelaku usaha yang memohonkan pemeriksaan lapang atas permohonan penerbitan SIPJI di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

- Verifikasi Stok Opname Bulanan dan Stok Masuk Pengambilan Alam untuk Pelaku Usaha Pemegang SIPJI

Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulannya untuk seluruh pemegang SIPJI di wilayah kerja BPSPL Denpasar. Pemeriksaan stok opname dilakukan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor 5 tahun

2021 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Stok Jenis Ikan Yang Dilindungi Terbatas Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks II CITES Hasil Pengambilan Dari Alam, Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Ii *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*.

- Peningkatan kapasitas verifikator dalam Bimbingan Teknis meliputi: Bimbingan Teknis Identifikasi SIBERANG (Sidat, Belida, dan Teripang) di Surabaya tanggal 5-6 Agustus 2025 dan Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas petugas layanan - Bimtek Identifikasi Koral, Kuda laut, dan napoleon di bali (9-11 september 2025)

- Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sejak tanggal 18 September 2021 BPSPL Denpasar telah melakukan penarikan PNBP terhadap produk pemanfaatan jenis ikan. Adapun total penarikan PNBP yang telah dilaksanakan oleh BPSPL Denpasar di seluruh Wilker pada tahun 2025 adalah sebesar Rp3.219.970.570.-

2. Forum Konsultasi Publik dan Review Pelayanan Publik BPSPL Denpasar telah dilaksanakan tanggal 14 Juli 2025
3. Bimbingan Teknis Penanganan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Terancam Punah (Buaya) (4 Desember 2025)
4. Penyadartahuan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Terancam Punah di Provinsi Jawa Timur (Sosialisasi Penyu) (11-13 Desember 2025)
5. Penyadartahuan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (20 Desember 2025)
6. Penilaian Evaluasi Pelayanan Publik BPSPL Denpasar secara daring. Adapun hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir pada Gambar 17.

 EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Eselon I : Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) Nama Unit Lokus : Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar			
No	Nama Pelayanan Publik	Nilai	Makna
1	Penerbitan surat angkut jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan dibatasi pemanfaatannya dalam negeri	4,83	A (Pelayanan Prima)
2	Penerbitan rekomendasi pemanfaatan jenis yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, masuk dalam appendix, dilarang ekspor, dan/atau dibatasi pemanfaatannya	4,83	A (Pelayanan Prima)
Total Nilai		4,83	A (Pelayanan Prima)

Kepala BPSPL Denpasar



Getreda Melsina Hehanussa, S. Pl., M. Si
NIP. 197503032002122003

Jakarta, 30 September 2025
Tim PEKPPP Mandiri KKP

1. Dini Wulansari, S.Pl. 

2. Irfan Hadi Nursanto, S.E. 

Gambar 17. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7. Penyediaan Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan, meliputi:
- Sewa kantor / gerai pelayanan di Denpasar, Surabaya, Mataram, Gorontalo, Mamuju, Makassar, Palu, dan Kendari
 - Pengadaan peralatan identifikasi berupa 1 unit mikroskop digital set
 - Pengadaan peralatan pelayanan berupa 5 unit printer scanner, 2 unit scanner, 1 unit AC standing 3 PK, 3 unit AC split 2 PK, 20 alat pengolah data, 3 unit Webcam ptz VC, 2 unit LCD proyektor, 4 unit TV, 1 unit microwave, 7 unit smart tab, 2 unit smart phone, 1 unit kamera digital, 3 unit kamera aksi, 2 unit drone, 5 set alat selam

- Pengadaan peralatan respon cepat berupa 6 unit kandang karantina dan 4 unit kendaraan fungsional
- Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan berupa meja dan kursi ruang pelayanan

Tabel 13. Dokumentasi IK Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)

	
Forum Konsultasi Publik dan Rvwview Pelayanan Publik	
	
Bimbingan Teknis Sidat, Belida, dan Teripang	
	
Bimbingan Teknis Koral, Kuda Laut, dan Napoleon	



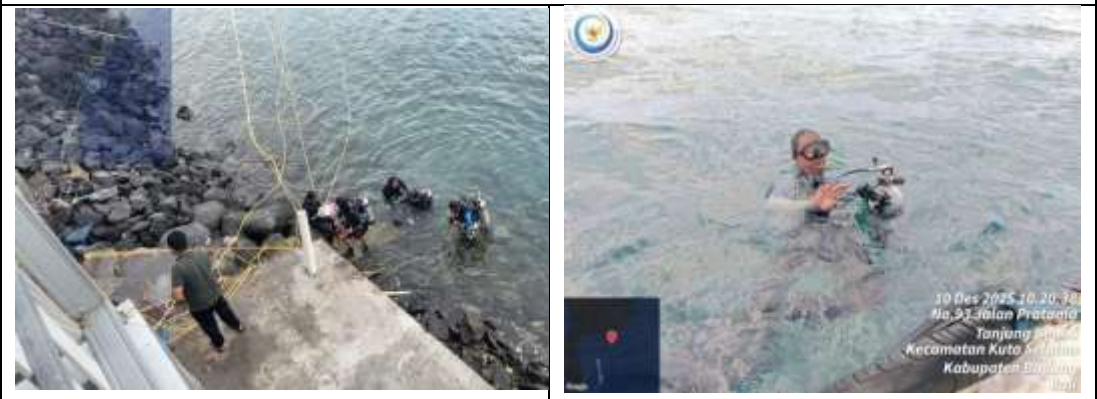
Bimbingan Teknis Penanganan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Terancam Punah (Buaya)



Penyadartahuan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Terancam Punah di Provinsi Jawa Timur (Sosialisasi Penyuluhan)



Penyadartahuan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah di Sumbawa Barat



Pendataan Stok Karang Hias yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	
	
	
	
Dokumentasi Pendukung Saranan Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan	

G. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi tahun 2026 melanjutkan pelayanan pemanfaatan jenis ikan di seluruh wilayah kerja BPSPL Denpasar dengan peningkatan layanan yang lebih baik.

IK 4. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaaaan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)

Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik merupakan nilai terendah yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik.

- a. Jenis Ikan dilindungi berdasarkan ketentuan nasional (Ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas);

- b. Jenis ikan masuk dalam Apendiks CITES;
- c. Jenis ikan yang masuk dalam daftar Jenis Asing Invasif (JAI); dan
- d. Jenis Ikan yang masuk dalam daftar Sumber Daya Genetik.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai indikator dari 4 aspek penilaian yang terdiri dari SAJI-DN, Rekomendasi, SKM dan penerapan konvensi).

Tabel 14. Capaian IK 4 BPSPL Denpasar

SK 4 Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar								
IK 4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)							
Tahun 2024	Tahun 2025							
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK	Target Renstra 2029	% Realisasi Thd Renstra 2029
-	80	90	112	100	80	112	80	112

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai) tercapai Nilai 90 dari target 80 (112%). Capaian ini diperoleh atas penilaian mandiri terhadap kinerja pelayanan perizinan. Penilaian terdiri dari aspel proses penerbitan SAJI-DN, Rekomendasi, Survey Kepuasan Masyarakat, dan penilaian konvensi.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 karena indikator kinerja tidak terdapat pada tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Capaian kinerja Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Renstra adalah telah tercapai 112% dari target renstra yaitu Nilai 80. Adapun pada tahun berikutnya BPSPL Denpasar perlu mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja tersebut.

D. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam dalam pelaksanaan pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES khususnya pada pelayanan yang tepat waktu dan kepuasan masyarakat.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar lembaga terkait baik yang berada di seluruh wilayah kerja BPSPL Denpasar dan/atau pusat baik secara daring maupun luring. Selain itu menjalin hubungan yang baik kepada pelaku usaha atau pengguna jasa guna meningkatkan kualitas layanan BPSPL Denpasar.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung antara lain sebagai berikut:

- 1. Dalam mencapai target pada indikator ini BPSPL Denpasar telah melakukan pelayanan peredaran jenis ikan dengan menerbitkan dokumen angkut seperti Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN), Rekomendasi Dalam Negeri, Rekomendasi Luar Negeri. Adapun rekapitulasi penerbitan tersaji pada Tabel.

Tabel 15. Dokumen Angkut Terbit Tahun 2025

Dokumen	Jumlah Dokumen Terbit
SAJI DN	441
Rekomendasi DN	317
Rekomendasi LN	2160

- 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survey kepuasan masyarakat dilakukan setiap pelayanan penerbitan dokumen telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk pengguna layanan BPSPL Denpasar. Adapun nilai SKM BPSPL Denpasar adalah sebagai berikut: Triwulan I Tahun 2025 nilai SKM 91,20 (Sangat Baik); Triwulan II Tahun 2025 nilai SKM 91,67 (Sangat Baik); Triwulan III Tahun 2025 nilai SKM 92,89 (Sangat Baik), dan Triwulan IV Tahun 2025 nilai SKM 89,87 (Sangat Baik). Nilai SKM Triwulan IV Tahun 2025 BPSPL Denpasar mengalami penurunan dibandingkan Triwulan sebelumnya. Adapun pada penilaian final unsur layanan yang memiliki nilai terendah berada pada unsur layanan U4 yaitu biaya/tarif layanan. Sedangkan, unsur layanan tertinggi berada pada unsur layanan U3 yaitu waktu penyelesaian. Berdasarkan data kritik dan saran yang direkap tim pada SKM Triwulan IV Tahun 2025 ini, mayoritas mengeluhkan pada kecepatan layanan dan tarif layanan.



Gambar 18. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat BPSPL Denpasar Tahun 2025

G. Rencana Aksi tahun 2026

Mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau termasuk Apendiks CITES.

IK 5. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)

Dokumen Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil merupakan dokumen pengumpulan data pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup 3 (tiga) hal sebagai berikut: Jumlah pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; Data perizinan pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; dan Data tumpang tindih kewenangan dalam pemberian perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menjumlahkan dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 16. Capaian IK 5 BPSPL Denpasar

SK 5 Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar								
IK 5	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)							
Tahun 2024	Tahun 2025							
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK	Target Renstra 2029 (Kawasan)	% Realisasi Thd Renstra 2029
-	1	1	100	100	1	100	-	-

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) tercapai 1 dokumen dari target 1 dokumen (100%). Dalam dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, capaian pada tahun 2025 telah teridentifikasi 15 pulau yaitu 7 pulau di Kabupaten Manggarai Barat, 3 pulau di Kabupaten Alor, 2 pulau di Kabupaten Rote Ndao, dan 3 pulau di Kabupaten Lombok Barat. Terdapat 41 pelaku usaha yang memanfaatkan pulau – pulau kecil dan perairan sekitarnya; dan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak sejumlah Rp4.142.953.329,-

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat target indikator kinerja yang sama.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena memiliki satuan target yang berbeda. Target Indikator Kinerja Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar memiliki satuan dokumen sedangkan sasaran program yang didukung adalah meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan satuan target Kawasan. Adapun indikator ini menjadi

pendukung dengan wilayah Kawasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

D. Analisis Keberhasilan

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar lembaga terkait baik yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan/atau pusat dalam pelaksanaan kegiatan secara daring dan luring untuk kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) antara lain telah dilaksanakan identifikasi perijinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di lokasi sebagai berikut :

- Kabupaten Lombok Barat pada 27 Juli - 2 Agustus 2025:

1. Gili Asahan
2. Gili Gede
3. Gili Layar
4. Gili Nanggu
5. Gili Sudak
6. Gili Kedis
7. Gili Lontar

- Kabupaten Manggarai Barat pada 13-17 Agustus 2025:

1. Pulau Bidadari
2. Pulau Siwona
3. Pulau Sabolo Besar
4. Pulau Seraya Kecil
5. Pulau Pungu
6. Pulau Sebayur
7. Pulau Kanawa

- Kabupaten Rote Ndao pada 11-17 Agustus 2025:

1. Pulau Rote
2. Pulau Landu

- Kabupaten Alor pada 8-12 Desember 2025:

1. Pulau Padar
2. Pulau Pura
3. Pulau Kepa

Adapun dari 19 pulau tersebut telah dilakukan tindak lanjut dan teridentifikasi 15 pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang dilakukan pemanfaatan oleh pelaku usaha. Pulau-pulau tersebut antara lain 7 pulau di Kabupaten Manggarai Barat yaitu Pulau Bidadari, Pulau Siwona, Pulau Seraya Kecil, Pulau Sabolo Besar, Pulau Pungu, Pulau Sebayur, dan Pulau Kanawa; 3 pulau di Kabupaten Alor yaitu Pulau Padar, Pulau Pura dan Pulau Kepa; 2 pulau di Kabupaten Rote Ndao yaitu Pulau Rote dan Pulau Landu; dan 3 pulau di Kabupaten Lombok Barat yaitu Gili Asahan, Gili Gede, Gili Nanggu.

Terdapat 41 pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan rincian 9 pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil di Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari 4 PMA dan 5 PMDN; 3 pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil di Kabupaten Alor yang terdiri dari 2 PMA dan 1 PMDN; 14 pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil di Kabupaten Rote Ndao yang terdiri dari 12 PMA dan 2 PMDN; dan 15 pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil di Kabupaten Lombok Barat yang terdiri dari 12 PMA dan 2 PMDN (terdapat 1 pelaku usaha yang belum diketahui status kepemilikannya). Terdapat potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sejumlah Rp4.142.953.329,-.





Gambar 19. Kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Dalam kegiatan ini terdapat Penyediaan Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut untuk mendukung penyelenggaraan identifikasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil antara lain: 2 unit printer epson WF100, 3 unit pinter epson L3250, 3 unit Harddisk Sandisk 2 TB, 2 unut Drone DJI Mavic 3, 1 unit Laptop Asus, 2 paket Alat Selam Scuba, 2 unit Action Cam Gopro 13, dan 1 unit Power Station Powerlite 300 watt.

G. Rencana Aksi Tahun 2026

Kegiatan tidak dilaksanakan pada tahun 2026

IK 6. IK. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Ruang Laut

sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen verifikasi pemanfaatan ruang laut dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 17. Capaian IK 6 BPSPL Denpasar

SK 6 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar								
IK 6		Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)						
Tahun 2024		Tahun 2025						
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK	Target Renstra 2029	% Realisasi Thd Renstra 2029
3	2	2	100	-	2	100	-	-

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) tercapai 2 dokumen dari target 2 dokumen (100%). Dua dokumen tersebut diperoleh dari kegiatan verifikasi pemanfaatan ruang laut dan monitoring pemanfaatan ruang laut. Verifikasi ruang laut dilakukan dengan menghadiri verifikasi/penilaian teknis permohonan KKPR di sejumlah 176 permohonan dan melakukan verifikasi/penilaian teknis permohonan KKPR di sejumlah 122 permohonan yang dilaksanakan oleh BPSPL Denpasar.

Monitoring pemanfaatan ruang laut dilakukan dengan kegiatan finalisasi penilaian pelaksanaan KKPR di wilayah kerja BPSPL Denpasar dengan hasil 31 KKPR Terbit yang dilakukan penilaian pelaksanaan dengan keterangan 1 KKPR terbit berstatus taat dengan catatan, 3 KKPR terbit berstatus tidak taat, dan 27 KKPR terbit berstatus taat dalam renaksi penilaian pelaksanaan KKPR tahun 2025 terdapat 28 target dokumen KKPR terbit yang dilaksanakan Penilaian Pelaksanaan KKPR. Telah dilakukan identifikasi pemanfaatan ruang laut sebanyak 439 subjek

hukum pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Lombok Timur, berupa Keramba Jaring Apung.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 tercapai 100% (target 2 dokumen dan capaian 2 dokumen), sedangkan capaian kinerja tahun 2024 target 3 dokumen tercapai 3 dokumen (100%). Hal terdapat capaian yang sama yaitu 100% dari target sehingga tidak ada perbedaan. Adapun perbedaan hanya pada jumlah target, namun kegiatan yang dilaksanakan tetap berjalan dan memenuhi target di tahun berjalan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena pada Indikator Kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar memiliki satuan dokumen sedangkan pada Renstra indikator kinerja ini mendukung sasaran program Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan target 500 dokumen. Adapun sebagai pendukung sasaran program tersebut *output* indikator kinerja ini adalah 2 dokumen dengan total verifikasi teknis permohonan KKPRL oleh BPSPL Denpasar sejumlah 122 permohonan dan 31 izin KKPRL dilakukan kegiatan penilaian pelaksanaan sepanjang tahun 2025.

D. Analisis Keberhasilan

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar khususnya ketepatan waktu verifikasi / penilaian teknis permohonan KKPRL sehingga kegiatan berjalan dengan lancar tanpa kendala.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

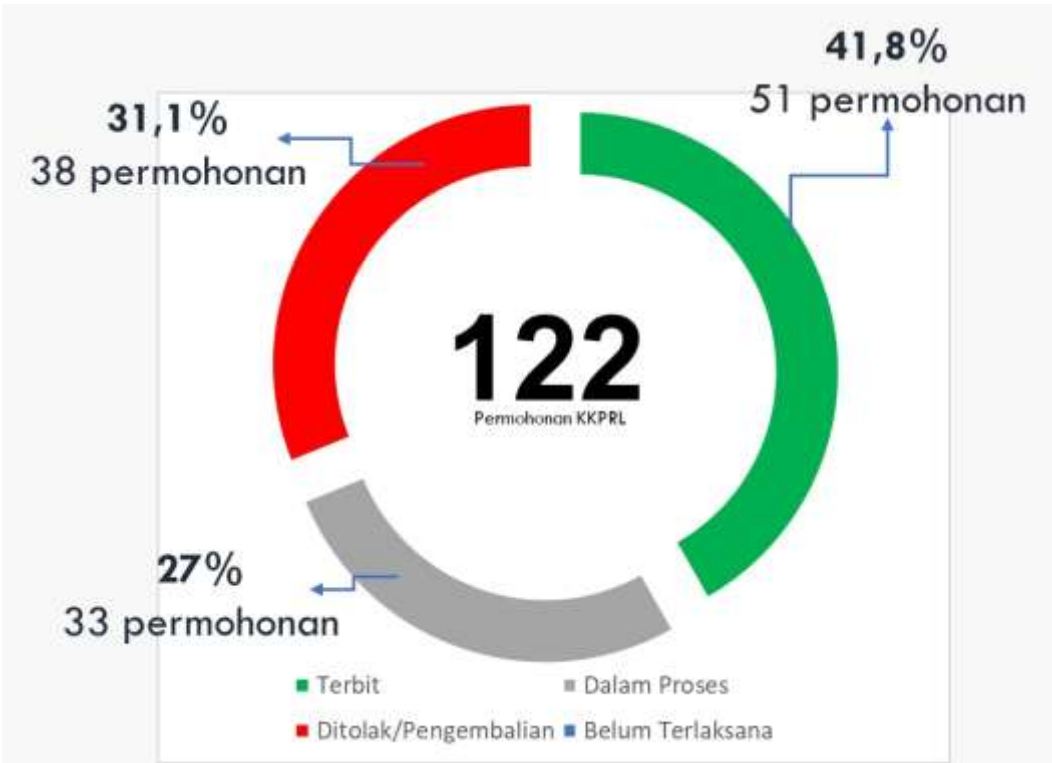
Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar lembaga terkait baik yang berada di seluruh wilayah kerja BPSPL Denpasar dan/atau pusat baik secara daring maupun luring. Selain itu menjalin hubungan yang baik kepada pelaku usaha.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

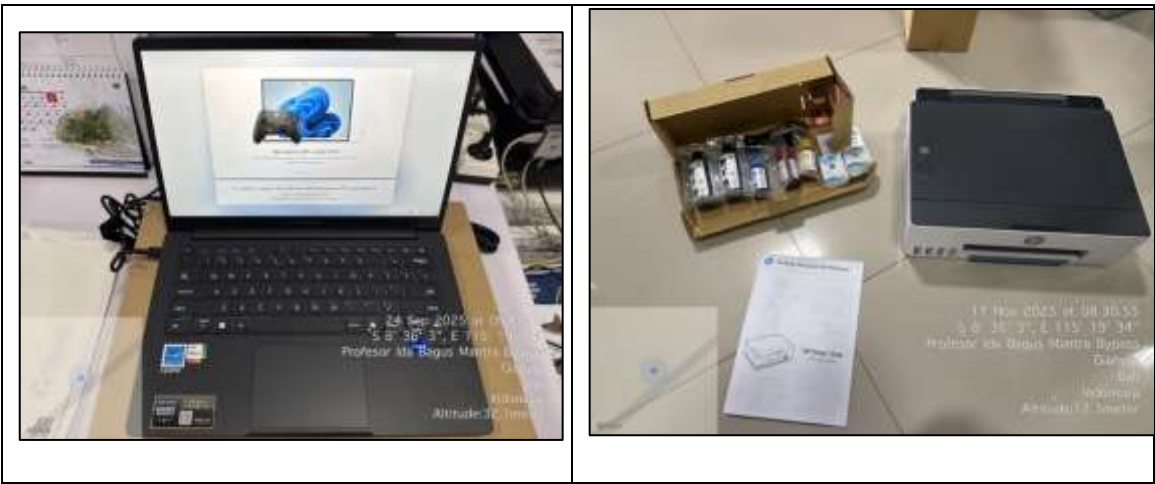
- a. Menghadiri undangan verifikasi/penilaian teknis permohonan KKPR sejumlah 176 permohonan yang dilaksanakan oleh Ditjen PRL
- b. Melakukan verifikasi/penilaian teknis permohonan KKPR sejumlah 122 permohonan yang dilaksanakan oleh BPSPL Denpasar



Gambar 20. Kegiatan Verifikasi Penilaian Teknis Permohonan KKPR oleh BPSPL Denpasar Tahun 2025

Telah dilakukan belanja barang sejumlah total 27 unit dari target 22 unit antara lain: Drone RTK 1 Unit, Alat pengolah data 7 unit, Alat conference 1 unit, GPS 1 unit, Proyektor 1 unit, Printer 6 unit, Smart tab 7 unit, smartphone 1 unit, Scanner 1 unit, dan komputer pelayanan 1 unit. Adapun gambar dari sarana pendukung penyelenggaraan penataan ruang laut tersaji pada Tabel 18.

Tabel 18. Dokumentasi Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



Alat Pengolah Data	Printer
	
Komputer Pelayanan	Alat Pengolah Data
	
GPS	Drone RTK
	
Smart Tab	Smart Phone

 Dec 20, 2025 11:16:52 8°36'3.04"S 115°19'33.371"E Pering Blahbatuh Ganyar Regency Bali	 1 Dec 2025 at 08:38 8°36'3.04"S 115°19'33.371"E Pering Ida Bagus Wentha Bypass Ganyar Bali Indonesia Altitude: 22.3meter Speed: 0.0km/h
Smart Tab	Alat Conference
 8°36'2.693"S 115°19'33.371"E Pering Blahbatuh Ganyar Regency Bali Indonesia Altitude: 22.3meter Speed: 0.0km/h	 8°36'2.693"S 115°19'33.371"E Pering Blahbatuh Ganyar Regency Bali Indonesia Altitude: 22.3meter Speed: 0.0km/h
Printer	Scanner
 1 Dec 2025 at 08:44:31 8°36'2.693"S 115°19'33.371"E Pering Ida Bagus Wentha Bypass Ganyar Bali Indonesia Altitude: 22.3meter Speed: 0.0km/h	
Proyektor	

BerAKHLAK

Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi adalah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dalam Penataan Ruang Laut, Implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut pada Penataan Ruang Laut, Asistensi Tata Cara Permohonan Pada Aplikasi Online Single Submission (OSS) dan Asistensi Tata Cara Penyusunan Dokumen Proposal (Gerai Sahabat Layanan).

Tabel 19. Pelaksanaan Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Nama Kegiatan
22 Juli 2025	Hotel Banyu Alit Buleleng	Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
23 Juli 2025	Hotel Banyu Alit Buleleng	Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
29 Juli 2025	Hotel Lombok Astoria, Kota Mataram	Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
30 Juli 2025	Hotel Lombok Astoria, Kota Mataram	Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
20 Agustus 2025	Hotel La Prima, Labuan Bajo	Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
2 September 2025	Four Points by Sheraton, Kota Surabaya	Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Tabel 20. Dokumentasi Kegiatan Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

	
Verifikasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut	
	
	
Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	

G. Rencana Aksi Tahun 2026

Pada tahun 2026 Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar tidak melaksanakan tugas dan fungsi dalam penataan dan pengelolaan ruang laut yang melaksanakan verifikasi, penilaian teknis dan pengendalian KKPRL. Tugas dan fungsi tersebut telah beralih ke Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

IK 7. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP BPSPL Denpasar dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BPSPL Denpasar merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkup BPSPL Denpasar. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Mitra Unit Organisasi Eselon I atau Sekretariat Ditjen PKRL. Data capaian dirilis melalui surat dari Sekretariat Ditjen PKRL.

Kategori dan Predikat nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Predikat	Nilai	Interpretasi
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 21. Capaian IK 7 BPSPL Denpasar

SK 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar								
IK 7	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)							
Tahun 2024	Tahun 2025							
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK	Target Renstra 2029	% Realisasi Thd Renstra 2029
85,55	70	86,90	124	18%	70	124	78	111

A. Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) tercapai nilai 86,90 dari target 70 (124%). Capaian indikator kinerja ini dilihat dari penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja pada penilaian mandiri SAKIP. Kegiatan pendukung indikator ini adalah kegiatan layanan perencanaan program dan anggaran serta layanan monitoring evaluasi dan pelaporan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian Kinerja Indikator Tahun 2025 dengan nilai 86,90 dari target 70 (124%) jika dibandingkan capaian Tahun 2024 nilai 85,55 dari target 81 (106%). Dengan demikian capaian kinerja Tahun 2025 terhadap tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar 18%. Adanya kenaikan tersebut dikarenakan perbedaan target dan nilai PM SAKIP yang meningkat pada tahun berjalan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan Renstra telah tercapai 124% pada tahun 2025, Untuk mencapai Renstra pada Tahun 2029 dengan target 78 capaian kinerja tahun 2025 juga telah mencapai target tersebut dengan persentase 111%. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah mempertahankan nilai PM SAKIP pada tahun berikutnya.

D. Analisis Keberhasilan

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target nilai PM SAKIP BPSPL Denpasar. Kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan baik dari aspek perencanaan kinerja, evaluasi yang diadakan setiap bulan dan triwulan, serta pelaporan yang tepat waktu.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar pegawai, unit pelaksana teknis, dan pusat dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan anggaran dan kinerja sampai dengan pelaporan.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) adalah sebagai berikut:

1. Layanan Perencanaan Program dan Anggaran
 - a. Melakukan revisi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
2. Layanan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 - a. Menyusun dokumen perencanaan kinerja
 - b. Melaksanakan pengukuran kinerja dan evaluasi rencana aksi

- c. Pengisian aplikasi Kinerjaaku dan e-Monev Bappenas
- d. Penyampaian laporan kinerja tepat waktu
- e. Melaksanakan Penilaian Mandiri SAKIP

G. Rencana Aksi Tahun 2026

Mempertahankan dan/atau meningkatkan perencanaan dan kinerja organisasi.

IK 8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)

Masyarakat di kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Formula Perhitungan:

Nilai IKPA = $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Tabel 22. Capaian IK 8 BPSPL Denpasar

SK 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar								
IK 8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)							
Tahun 2024	Tahun 2025							
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK	Target Renstra 2029	% Realisasi Thd Renstra 2029
99,47	89	94,11	105	-1	89	105	91	103

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) nilai 94,11 dari target 89 (105%). Penilaian indikator kinerja ini meliputi kualitas perencanaan anggaran (revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA), kualitas pelaksanaan anggaran (penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP), dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (capaian output). Kegiatan pendukung pada indikator kinerja ini adalah kegiatan pengelolaan keuangan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 yang memiliki target 93,76 capain 99,47 (106%) terdapat penurunan 1%. Adanya penurunan ini dikarenakan beberapa faktor antara lain: perbedaan target tahunan, belanja kontraktual seharusnya dilaksanakan sebelum Triwulan III dan baru dilaksanakan pada Triwulan IV sehingga nilai tidak maksimal, dampak dari efisiensi mempengaruhi pengelolaan UP dan TUP, dan penyerapan anggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan Renstra telah mencapai target yaitu dengan persentase 105%. Jika melihat target Renstra tahu 2029 yaitu 91, maka capaian tahun 2025 telah mencapai target tersebut yaitu 103%. Dengan demikian yang perlu dilakukan BPSPL Denpasar adalah mempertahankan nilai tersebut serta dapat memperbaiki nilai yang tidak maksimal yaitu pengelolaan UP dan TUP serta penyerapan anggaran.

D. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPSPL Denpasar. Adapun kendala dalam pengelolaan UP dan TUP serta penyerapan anggaran dapat teratasi sehingga memperoleh nilai baik.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar Kementerian/lembaga terkait yang berada di wilayah kerja BPSPL Denpasar dan/atau pusat baik secara daring maupun luring.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) adalah sebagai berikut:

- Rekonsiliasi LPJ Satker dengan KPPN Denpasar

- Rekonsiliasi Penerimaan Negara Satker dengan KPPN Denpasar
- Rekonsiliasi Rekening Satker dengan KPPN Denpasar
- Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN Denpasar

G. Rencana Aksi Tahun 2026

- Mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai IKPA
- Mengevaluasi pengelolaan UP dan TUP serta penyerapan anggaran

IK 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu.

Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1. Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO

b. Efisiensi

1. Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan

indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Penggunaan}_{SBK} = \left(\frac{\sum RO\ SBKK + \sum RO\ SBKU}{\sum RO\ SBKK\ \text{dalam PMK} + \sum RO\ \text{memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

2. Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satker

Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK

Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$\text{NKPA Satker} = (\text{CRO} \times W_{\text{CRO}}) + (\text{Penggunaan}_{\text{SBK}} \times W_{\text{Penggunaan}_{\text{SBK}}}) + (\text{NE}_{\text{Alokasi}} \times W_{\text{E}_{\text{Alokasi}}})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker

CRO : Capaian RO

PenggunaanSBK : Penggunaan SBK

NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi

WCRO : Bobot Capaian RO

WpenggunaanSBK: Bobot Penggunaan SBK

WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

Tabel 23. Capaian IK 9 BPSPL Denpasar

SK 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar								
IK 9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)							
Tahun 2024	Tahun 2025							
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK	Target Renstra 2029	% Realisasi Thd Renstra 2029
96,42	71,5	97,86	137	1	71,5	137	82,5	117

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) tercapai nilai 97,86 dari target 71,5 (137%) dengan kategori sangat baik. Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari capaian kegiatan pendukung layanan BMN, layanan rumah tangga, dan layanan operational perkantoran.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian 96,42 dari target 71 (136%). Dengan demikian kenaikan terhadap tahun 2025 meningkat 1%. Adapun peningkatan tersebut dikarenakan lebih terstrukturnya dalam pencapaian target melalui kegiatan layanan BMN, layanan rumah tangga dan layanan operasional perkantoran.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan Renstra telah tercapai 120%. Jika melihat target Renstra tahun 2029 yaitu 82,5 maka capaian kinerja telah tercapai dengan persentase 117%. Adapun hal yang perlu dilakukan adalah berhati-hati dan mempertahankan nilai NKPA pada tahun berikutnya.

D. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target nilai kinerja perencanaan anggaran BPSPL Denpasar khususnya pada kegiatan layanan BMN, layanan rumah tangga dan layanan operasional perkantoran yang rutin dilaksanakan sepanjang tahun berjalan.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar pegawai dan lembaga terkait baik secara daring maupun luring.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) adalah sebagai berikut:

- Layanan BMN
- Layanan rumah tangga
- Layanan perkantoran
 - a. Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan sesuai ketentuan
 - b. Pembayaran rutin operasional dan pemeliharaan kantor sesuai perencanaan

G. Rencana Aksi Tahun 2025

Mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai NKPA yang diperoleh dengan mengevaluasi hasil capaian yang diperoleh.

IK 10. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025:

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 24. Capaian IK 10 BPSPL Denpasar

SK 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar								
IK 10	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)							
Tahun 2024	Tahun 2025							
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK	Target Renstra 2029	% Realisasi Thd Renstra 2029
4	4	4	100	-	4	100	-	-

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) tercapai 4 dokumen dari target 4 dokumen (100%). Capaian 4 laporan SPIP yaitu laporan SPIP TW IV Tahun 2024, laporan SPIP TW I Tahun 2025, laporan SPIP TW II Tahun 2025, dan laporan SPIP TW III Tahun 2025 yang merupakan capaian dari target IK ini pada Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja pada Tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024. Capaian kinerja tersebut sama sama tercapai 100%.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Capaian kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena pada Indikator Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar memiliki satuan dokumen sedangkan pada Renstra indikator kinerja ini mendukung sasaran program nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK dengan satuan nilai.

D. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar yaitu dengan melakukan pelaporan SPIP tepat waktu.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan secara daring dan luring untuk penyusunan pelaporan SPIP.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) adalah telah dilakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP TW IV Tahun 2024, Laporan SPIP TW I Tahun 2025, Laporan SPIP TW II Tahun 2025, dan Laporan SPIP TW III Tahun 2025.

G. Rencana Aksi Tahun 2026

Melakukan penyusunan Laporan SPIP secara tepat waktu.

IK 11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula perhitungan:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$
$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$
$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$
$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Tabel 25. Capaian IK 11 BPSPL Denpasar

SK 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar								
IK 11		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)						
Tahun 2024		Tahun 2025						
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK	Target Renstra 2029	% Realisasi Thd Renstra 2029
91,36	80	86,85	108	4	80	108	84	103

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks) tercapai 86,85 dari target 80 (108%). Capaian indikator kinerja ini melalui kegiatan layanan SDM dengan masing-masing pegawai menginput sertifikat

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar dan workshop ke aplikasi MyASN digital.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian 91,36 dari target 88 (104%) memiliki kenaikan sejumlah 4% dengan tahun 2024. Peningkatan tersebut dikarenakan perbedaan target pada tahun berjalan selain itu koordinasi antar pegawai lebih baik dalam mengupload dan menginput sertifikat pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar dan workshop.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan Renstra, realisasi telah mencapai 108% dari target Renstra. Sedangkan untuk target Renstra Tahun 2029 yaitu 84 target tahun 2025 telah mencapai target tersebut dengan persentase capaian 103%. Adapun yang perlu dilakukan adalah mempertahankan nilai dan/atau meningkatkan nilai tersebut.

D. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target indeks profesionalitas (IP ASN) lingkup BPSPL Denpasar. Kegiatan sejauh ini mengalami lebih banyak keberhasilan karena pelaksanaan kegiatan manajemen SDM secara rutin yang baik oleh koordinator kegiatan dan kerjasama yang baik dari staf pelaksana kegiatan dalam penyusunan SKP.

E. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar pegawai di seluruh wilayah kerja BPSPL Denpasar secara daring maupun luring.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks) adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja ASN BPSPL Denpasar Triwulan IV dan Periode Final Tahun Anggaran 2024, Triwulan I Tahun 2025, Triwulan II Tahun 2025, dan Triwulan III Tahun 2025
2. Pengusulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK
3. Pengusulan Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional
4. Pengusulan Kenaikan Pangkat Periode Tahun 2025
5. Pengusulan Satyalancana Karya Satya X Tahun dan XX Tahun
6. Menyiapkan dan melaksanakan Dialog Kinerja BPSPL Denpasar

7. Pengusulan Rencana Tugas Belajar Tahun 2025
8. Pengusulan Penataan Jabatan Fungsional Umum Lingkup BPSPL Denpasar
9. Menyiapkan kegiatan olahraga senam bersama selama Tahun 2025
10. Menyiapkan usulan ujian kompetensi Jabatan fungsional Kepegawaian
11. Menyiapkan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
12. Menyiapkan Pemetaan Jabatan Penata Laksana Barang lingkup BPSPL Denpasar
13. Pengusulan mengikuti Uji Kompetensi untuk Jabatan Fungsional Non KKP
14. Komitmen Kepesertaan JKN Tahun 2026 Bagi PPNPN/Non ASN dan PPPK Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya
15. Menyiapkan fasilitas untuk mendukung peningkatan kompetensi bagi pegawai yang akan mengikuti Penilaian Kompetensi untuk kenaikan jabatan Fungsional atau Jabatan Struktural berupa penyediaan Buku Pembelajaran Psikotes dan e-book tentang Manajerial, Sosial, Kultural.

G. Rencana Aksi Tahun 2026

Mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai IP ASN.

IK 12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit DJPKRL sampai dengan waktu pengukuran.

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti BPSPL Denpasar}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPSPL Denpasar}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Jika tidak ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian 100.
2. Jika ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100.

Tabel 26. Capaian IK 12 BPSPL Denpasar

SK 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar								
IK 12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)							
Tahun 2024	Tahun 2025							
Capaian	Target TW IV	Capaian TW IV	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK	Target Renstra 2029	% Realisasi Thd Renstra 2029
100	95	87	91,58	--33,42	95	91,58	84	103

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%) pada Triwulan IV Tahun 2025 tercapai 87% dari target 95% (91,58%). Presentase capaian dapat dilihat pada aplikasi SIDAK.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 terdapat penurunan capaian sejumlah 33,42% dari tahun 2024. Adapun perbandingan capaian tersebut dikarenakan belum ditindaklanjutnya catatan pada aplikasi SIDAK di Tahun 2025

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan Renstra maka telah memenuhi target Renstra dengan persentase 108%. Adapun jika dilihat target Renstra tahun 2029 yaitu 84 telah tercapai target. Upaya yang dapat dilakukan adalah tetap melakukan pengecekan serta segera menindaklanjuti catatan yang ada pada aplikasi SIDAK.

D. Analisis Keberhasilan

Pada Triwulan IV Tahun 2025 terdapat hasil catatan pengawasan APIP terkait uji substansi pemantauan kegiatan proyek PHLN LAUTRA Tahun Anggaran 2025. Adapun catatan tersebut akan ditindaklanjuti pada aplikasi SIDAK selambat-lambatnya pada Triwulan I Tahun 2026.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar lembaga lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan baik secara daring maupun luring.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%) adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (BPSPL Denpasar) tanggal 19-25 Januari 2025 oleh Inspektorat Jenderal KKP
2. Menyiapkan dokumen tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi
3. Melakukan upload dokumen tindaklanjut pada Aplikasi SIDAK KKP
4. Seluruh Temuan APIP atas audit Pertanggungjawaban LAUTRA telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi sampai dengan terbitnya Berita Acara Tindak Lanjut
5. Seluruh Temuan APIP atas audit Pertanggungjawaban LAUTRA telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi sampai dengan terbitnya Berita Acara Tindak Lanjut
6. Terdapat Hasil Catatan Pengawasan APIP terkait Uji Substansi Pemantauan Kegiatan Proyek PHLN LAUTRA TA 2025

G. Rencana Aksi Tahun 2026

Melakukan tindak lanjut catatan pengawasan pada aplikasi SIDAK.

IK 13. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar(%)

Temuan LHP BPK BPSPL Denpasar yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSPL Denpasar Tahun 2025.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK BPSPL Denpasar yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK BPSPL Denpasar}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Tabel 27. Capaian IK 13 BPSPL Denpasar

SK 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar								
IK 13	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)							
Tahun 2024	Tahun 2025							
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK	Target Renstra 2029	% Realisasi Thd Renstra 2029
100	100	100	100	-	100	100	-	-

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%) tercapai 100 dari target 100 (100%). BPSPL Denpasar tidak terdapat temuan LHP BPK RI atas LK KKP TA.2024 sehingga capaian tercapai 100%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sama sama tercapai 100% sehingga tidak terdapat kenaikan atau penurunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Capaian kinerja tahun 2025 BPSPL Denpasar tidak terdapat temuan LHP BPK RI atas LK KKP TA.2024 sehingga target mendukung sasaran program Renstra batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

D. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar dan sampai dengan akhir Tahun 2025 belum terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar lembaga terkait baik yang berada di seluruh wilayah kerja BPSPL Denpasar dan/atau pusat baik secara daring maupun luring.

F. Kegiatan Pendukung

Telah melakukan Tindak Lanjut atas temuan BPK RI pada pertanggungjawaban keuangan kegiatan LAUTRA tahun 2024 dan sampai dengan akhir tahun 2025 belum terdapat pemeriksaan BPK RI Tahun 2025.

G. Rencana Aksi Tahun 2026

Jika ada temuan segera menindaklanjuti.

IK 14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit.

Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Formulasi perhitungan yaitu dengan Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) dan/atau inspektorat mitra DJPKRL dan/atau tim pembangunan zona integritas DJPKRL. Jika pada tahun anggaran berjalan tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian yang digunakan adalah capaian nilai WBK tahun sebelumnya.

Tabel 28. Capaian IK 14 BPSPL Denpasar

SK 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar								
IK 14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)							
Tahun 2024	Tahun 2025							
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK	Target Renstra 2029	% Realisasi Thd Renstra 2029
87,57	75	87,57	117	-	75	117	-	-

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai) tercapai nilai 87,57 dari target 75 (117%). Adapun kegiatan pendukung pada indikator kinerja ini adalah kegiatan Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan capaian yang sama yaitu nilai 87,57 dari target 75 (117%) sehingga capaian sama tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra dikarenakan tidak ada Renstra untuk Indikator Kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK.

D. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar. Pelaksanaan kegiatan sejauh ini dilakukan kerjasama yang baik dari koordinator-koordinator kegiatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan WBK secara bertahap.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar pegawai, lembaga, dan/atau Kementerian terkait WBK baik secara daring maupun luring.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IK Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai) adalah pembentukan tim kerja serta Rapat Evaluasi dan Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

G. Rencana Aksi Tahun 2026

- Melakukan pembentukan tim kerja
- Melakukan rapat kinerja dan evaluasi WBK

IK 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

- Pengawasan sistem kearsipan internal
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.
- Pengawasan pengelolaan arsip aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
- Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Denpasar akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI yang mencakup aspek pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - penciptaan arsip (25%)
 - penggunaan arsip (25%)

- pemeliharaan arsip (25%)
 - penyusutan arsip (25%)
2. Sumber Daya Kearsipan (bobot 50%)
- sumber daya manusia kearsipan (50%)
 - prasarana dan sarana (50%)
3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	> 90 – 100
A	Memuaskan	> 80 – 90
BB	Sangat Baik	> 70 – 80
B	Baik	> 60 – 70
CC	Cukup	> 50 – 60
C	Kurang	> 30 – 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 29. Capaian IK 15 BPSPL Denpasar

SK 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar								
IK 15		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)						
Tahun 2024		Tahun 2025						
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK	Target Renstra 2029	% Realisasi Thd Renstra 2029
98,80	80	86,11	108	-33	80	108	84	102

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai) tercapai 86,11 dari target 80 (108%). Kegiatan pada indikator kinerja ini adalah layanan persuratan, tata usaha, dan kearsipan secara rutin.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu dengan capaian 98,80 dari terget 70 (141%) terdapat penurunan capaian sejumlah 33% hal tersebut dikarenakan perbedaan target pada tahun berjalan, perbedaan indikator/komponen penilaian yaitu SDM kearsipan di BPSPL Denpasar belum

memiliki sertifikasi kearsipan. Namun, target pada Tahun 2025 tetap terpenuhi yaitu 108%.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan Renstra telah tercapai target dengan persentase 108%. Adapun jika melihat target Renstra tahun 2029 yaitu 84 maka capaian sudah mencapai target dengan persentase 102%. Upaya yang dapat dilakukan yaitu mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai supaya lebih maksimal pada tahun berikutnya.

D. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar. Faktor keberhasilan dengan memahami dan menerapkan standar persuratan dan kearsipan. Memastikan semua dokumen sesuai standar yang ada. Selain itu adanya kedisiplinan, dukungan dan kerjasama serta kolaborasi seluruh tim dalam pelaksanaan kegiatan persuratan dan pengarsipan. Serta mengontrol segala persuratan dan pengarsipan yang ada dalam lingkup BPSPL Denpasar.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar lembaga terkait baik yang berada di wilayah kerja BPSPL Denpasar dan/atau pusat baik secara daring maupun luring.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai) adalah melaksanakan layanan persuratan, tata usaha, dan kearsipan secara rutin.

G. Rencana Aksi Tahun 2026

Mengikutsertakan SDM kearsipan BPSPL Denpasar dalam sertifikasi kearsipan.

IK 16. Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.

Ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

$$\text{Presentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan Pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 30. Capaian IK 16 BPSPL Denpasar

SK 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar								
IK 16	Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)							
Tahun 2024	Tahun 2025							
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK	Target Renstra 2029	% Realisasi Thd Renstra 2029
-	76	100	131	-	76	131	80	125

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Denpasar tercapai 100 dari target 76 (31%).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat indikator kinerja Presentase

Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%) .

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan Renstra telah tercapai realisasi 131%. Jika melihat target Renstra Tahun 2029 dengan target 80 maka capaian tahun 2025 telah tercapai persentase 125%. Upaya yang dapat dilakukan adalah mempertahankan nilai tersebut sehingga tercapai di akhir Renstra.

D. Analisis Keberhasilan

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dan target setiap triwulan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Denpasar.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar lembaga terkait baik di wilayah kerja BPSPL Denpasar dan/atau pusat secara daring maupun luring.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Denpasar adalah sebagai berikut: telah dilaksanakan revisi Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan Revisi POK 1 yang telah disahkan, telah dilaksanakan penyiapan bahan untuk revisi rencana umum pengadaan sesuai revisi DIPA 2 dalam rangka efisiensi anggaran, revisi Rencana Umum Pengadaan pasca efisiensi anggaran, pengisian kertas kerja data RUP pasca efisiensi anggaran, telah dilaksanakan penyiapan bahan untuk revisi rencana umum pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIRUP, telah dilaksanakan penyiapan bahan serta pelaksanaan revisi rencana umum pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIRUP sesuai dengan revisi RKAKL terakhir. Adapun RUP tersebut telah diumumkan dan dipublikasikan sesuai ketentuan.

G. Rencana Aksi Tahun 2026

Mempertahankan nilai Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar.

IK 17. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi

dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran.

Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023. Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu: Mengumumkan informasi publik; Menyediakan informasi publik; Sarana dan Prasarana; Kelembagaan; dan Digitalisasi.

Formula Perhitungan:

1. Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi).
2. SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.
3. Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP.
4. Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari penilaian SAQ yang diakses melalui ppid.kkp.go.id/pelikan.
5. Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

No.	Predikat	Interval Sektor
1	Informatif	90 – 100

No.	Predikat	Interval Sektor
2	Menuju Informatif	80 – 89,9
3	Cukup Informatif	60 – 79,9
4	Kurang Informatif	40 – 59,9
5	Tidak Informatif	< 39,9

Tabel 31. Capaian IK 17 BPSPL Denpasar

SK 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar								
IK 17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)							
Tahun 2024	Tahun 2025							
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK	Target Renstra 2029	% Realisasi Thd Renstra 2029
-	91	100	110	100	91	110	95	105

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 25.PPID-KKP/XII/2025 tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar mendapatkan nilai 100 dari target 91 (capaian 110%). Pada Indikator Kinerja ini dilakukan kegiatan rutin layanan kehumasan yaitu dengan publikasi pada media sosial BPSPL Denpasar dengan jumlah 150 postingan sepanjang tahun 2025. Berkenaan dengan hal tersebut BPSPL Denpasar juga telah mendapat penghargaan sebagai unit organisasi berpredikat Informatif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian dan Perikanan Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian kinerja Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024 karena pada tahun 2024 tidak terdapat Indikator Kinerja yang sama.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2029

Capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan Renstra telah mencapai target 110%. Adapun jika melihat target Renstra Tahun 2029 yaitu 95 maka telah tercapai persentase 105%. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan

adalah mempertahankan nilai tersebut supaya dapat mencapai target pada tahun 2029.

D. Analisis Keberhasilan

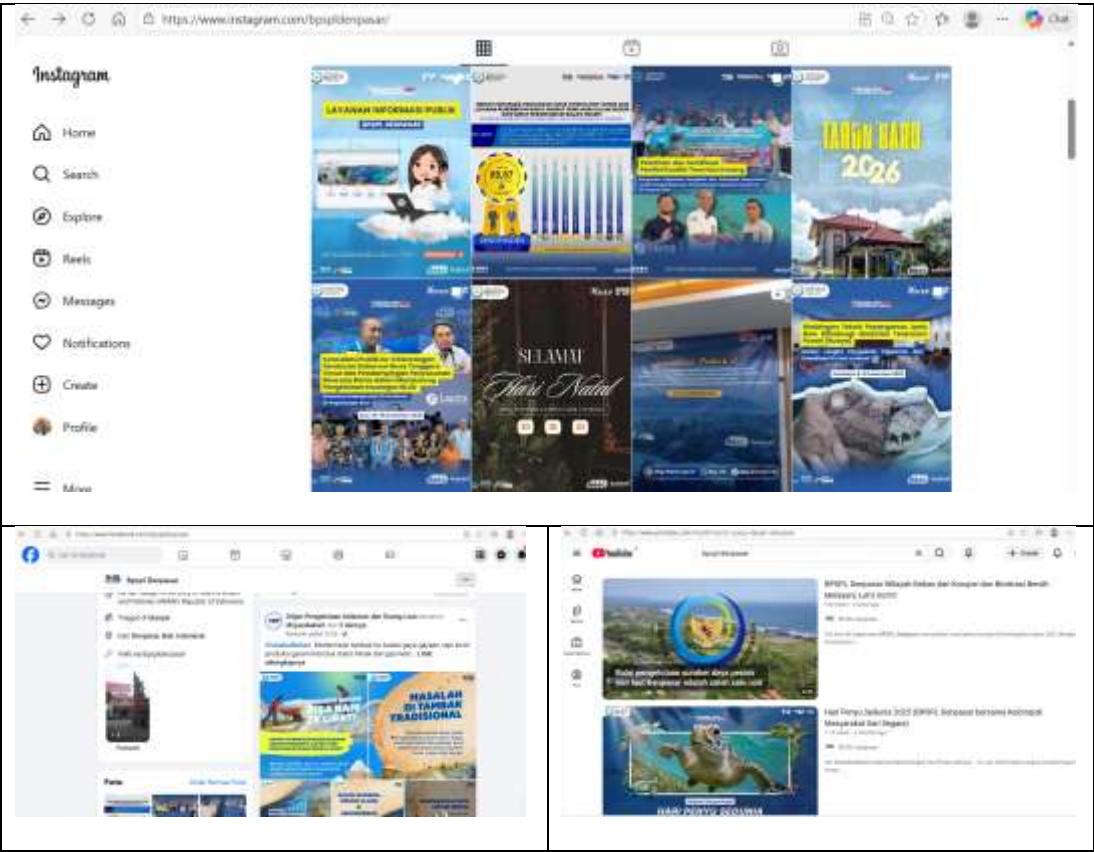
Kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan serta tim dalam mencapai target Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar lembaga terkait baik yang berada di seluruh wilayah kerja BPSPL Denpasar dan/atau pusat baik secara daring maupun luring.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) adalah melaksanakan publikasi kegiatan secara rutin sebanyak 150 postingan kegiatan sepanjang Tahun 2025. Postingan telah dipublikasi melalui akun media sosial BPSPL Denpasar yang terdiri dari media sosial instagram, facebook, X, dan Youtube. Adapun beberapa dokumentasi publikasi yang telah dilakukan tersaji pada Gambar berikut.



Tabel 32 . Media Publikasi BPSPL Denpasar

G. Rencana Aksi Tahun 2026

Melaksanakan publikasi diseluruh media sosial BPSPL Denpasar.

3.3 Kinerja Anggaran

Pagu awal BPSPL Denpasar tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp20.627.700.000,- yang terdiri dari rupiah murni Rp12.012.700.000,-, PNBPNP Rp2.075.000.000,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp6.540.000.000,-. Dari pagu awal terdapat dana yang tidak dapat dicairkan (blokir) berupa blokir kode A (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) dan blokir kode 2 (alokasi harus dilengkapi dengan dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait) sebesar Rp2.905.441.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) sebesar Rp2.880.941.000,- dan belanja modal (53) sebesar Rp 24.500.000,-.

Pada Bulan Februari Tahun 2025, terdapat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi pada anggaran dibawah pengelolaanya. Setelah dilakukan revisi DIPA efisiensi anggaran pada tanggal 23 Februari 2025, pagu anggaran BPSPL Denpasar sebesar Rp20.627.700.000,- dengan jumlah dana yang diblokir sebesar Rp4.523.858.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) Rp 4.499.358.000,- dan belanja modal (53) Rp24.500.000,-.

Pada Triwulan II terdapat pengesahan revisi DIPA berupa penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA dalam rangka buka blokir anggaran kode 2 pada sumber dana PNBPNP sebesar Rp. 2.075.000.000,- sesuai surat dari Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan nomor S-531/AG/AG.3/2025 tanggal 17 Juni 2025. Adapun anggaran belum dapat digunakan dikarenakan masih menunggu persetujuan penetapan Maksimum Pencairan PNBPNP dari Kementerian Keuangan. Sampai dengan Triwulan II terdapat dana yang tidak dapat dicairkan (blokir) berupa blokir kode A (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) sebesar Rp2.395.198.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) sebesar Rp2.395.198.000,-. Realisasi sampai dengan Triwulan II (Per 30 Juni 2025) sesuai data omspan sebesar Rp5.090.577.395,- (24,68%) dengan rincian realisasi belanja pegawai Rp3.873.645.353,- (45,48%), belanja barang Rp1.216.932.042,- (10,15%), dan belanja modal Rp0,- (0%).

Pada Triwulan III telah dilaksanakan rewiu rekomposisi usulan tambahan izin penggunaan PNBPD Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025 tanggal 10-11 September 2025. Rekomposisi ini dilaksanakan karena adanya penambahan anggaran sumber dana PNBPD Tahun Anggaran 2025 yang semula Rp1.200.000.000,- menjadi Rp11.650.000.000,-. Peruntukan penambahan anggaran ini untuk mengakomodir belanja selain belanja perjalanan dinas. Pada Triwulan ini juga dilaksanakan pembahasan rekomposisi usulan tambahan izin penggunaan PNBPD Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tanggal 1 dan 2 Oktober 2025. BPSPL Denpasar mengusulkan penambahan anggaran sebesar 620.000.000 dari yang semula 875.000.000 menjadi 1.495.000.000. penambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanja modal peralatan dan mesin.

BPSPL Denpasar telah melakukan tiga kali revisi DIPA pada Triwulan III antara lain; Revisi Halaman III DIPA pada tanggal 15 Juli 2025, Revisi Perubahan Kantor Bayar tanggal 19 Agustus 2025 (Revisi ini untuk melakukan koreksi kantor bayar pada kegiatan dengan sumber dana Pinjaman Luar Negeri yang semula KPPN Denpasar (037) menjadi KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140)), dan Revisi DIPA Pemutakhiran KPA tanggal 21 Agustus 2025 untuk mengakomodir perubahan POK kegiatan. Realisasi sampai dengan Triwulan III (Per 30 September 2025) sesuai data omspan sebesar Rp Rp8.671.656.662,- (42,04%) dengan rincian realisasi belanja pegawai Rp5.404.867.509,- (63,46%), belanja barang Rp3.244.305.548,- (27,07%), dan belanja modal Rp22.483.605,- (18,07%).

Pada Triwulan IV dilakukan sebelas kali revisi anggaran meliputi satu kali revisi halaman III DIPA, lima kali revisi pemutakhiran KPA, dua kali revisi Satker/POK, satu kali revisi DIPA kewenangan Kanwil, satu kali revisi penambahan pagu sumber dana PNBPD, dan satu kali revisi DIPA relaksasi anggaran. Pada triwulan ini terdapat penambahan pagu bersumber dana PNBPD sejumlah Rp11.029.054.000,-. Penambahan anggaran ini untuk sewa gerai pelayanan di delapan lokasi wilayah kerja BPSPL Denpasar yaitu Denpasar, Surabaya, Mataram, Gorontalo, Mamuju, Makassar, Palu, dan Kendari; pengadaan sarana pendukung penyelenggaraan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut; pengadaan sarana pendukung penyelenggaraan konservasi biota perairan; pengadaan sarana pendukung penyelenggaraan penataan ruang laut; Belanja jasa lainnya kegiatan peningkatan pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan Apendiks CITES.

Revisi relaksasi dilakukan pengurangan anggaran pada sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp600.822.000,- dari anggaran semula Rp31.656.754.000,- menjadi Rp31.055.932.000,- terdiri atas belanja pegawai (51) Rp497.483.000,- dan belanja

barang (52) Rp103.339.000,-. Revisi pemutakhiran KPA dan revisi Satker/POK dilakukan untuk menyesuaikan pagu disetiap detil untuk mengakomodir percepatan pelaksanaan kegiatan.

Realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 (Per 31 Desember 2025) sesuai data omspan sebesar Rp27.124.640.662,- (87,34%) dengan total blokir Rp2.291.859.000,- dengan rincian realisasi belanja pegawai Rp7.401.629.623,- (92,30%), belanja barang Rp12.977.586.171,- (82,22%), dan belanja modal Rp6.745.424.868,- (93,01%).

Tabel 33. Realisasi Anggaran BPSPL Denpasar Tahun 2025

Uraian					Pagu	Realisasi	%
FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup				16,313,785,000	15,490,947,559	94.96 %
FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan				16,313,785,000	15,490,947,559	94.96 %
	QMA	Data dan Informasi Publik			7,395,931,000	6,967,519,194	94.21 %
	QMA.002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan			7,395,931,000	6,967,519,194	94.21 %
		051	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan		7,395,931,000	6,967,519,194	94.21 %
			051.OA	Pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan Appendiks CITES	1,122,392,000	1,040,460,792	92.70 %
			051.OB	Peningkatan Pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan Appendiks CITES	497,600,000	496,098,402	99.70 %
			051.OC	Sewa Kantor Pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan Appendiks CITES	5,775,939,000	5,430,960,000	94.03 %
	RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan			4,013,123,000	3,837,656,288	95.63 %
	RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem			313,820,000	313,790,020	99.99 %
		051	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut		313,820,000	313,790,020	99.99 %
			051.OA	Pengadaan Peralatan Pendukung Penyelenggaraan Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	313,820,000	313,790,020	99.99 %
	RAL.002	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan			3,699,303,000	3,523,866,268	95.26 %
		051	Jumlah Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Perairan		3,699,303,000	3,523,866,268	95.26 %
			051.OA	Pengadaan Peralatan Pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan Appendiks CITES	765,847,000	741,368,068	96.80 %
			051.OB	Pengadaan Peralatan Survey Data Potensi	449,700,000	449,505,600	99.96 %
			051.OC	Pengadaan Peralatan Identifikasi Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES	41,000,000	40,903,500	99.76 %
			051.OD	Pengadaan dan Sewa Peralatan Respon Cepat Penanganan Keterdamparan dan Konflik Biota	2,417,500,000	2,267,300,000	93.79 %
			051.OE	Pengadaan Sarana Prasarana Petugas Pelayanan Perijinan Jenis	25,256,000	24,789,100	98.15 %
	REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem			4,904,731,000	4,685,772,077	95.54 %
	REA.004	Oceans for Prosperity Project - LAUTRA			4,904,731,000	4,685,772,077	95.54 %
		051	Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang Lautan Sejahtera		4,904,731,000	4,685,772,077	95.54 %
			051.OA	Dukungan Operasional dan Pendampingan Pelaksanaan Proyek	150,000,000	148,447,009	98.96 %
			051.OA	LAUTRA	150,000,000	148,447,009	98.96 %
			051.OB	Monitoring Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor	450,000,000	440,204,589	97.82 %
			051.OC	Respon Cepat Penanganan Biota Perairan di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor	150,000,000	130,524,262	87.02 %
			051.OD	Penjangkauan Stakeholder Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor	300,000,000	293,073,203	97.69 %

Uraian					Pagu	Realisasi	%
			051.0E	Penguatan Kapasitas Pengelola dan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor	700,000,000	681,237,426	97.32 %
			051.0F	Fasilitasi Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor	560,000,000	556,199,888	99.32 %
			051.0G	Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor	2,594,731,000	2,436,085,700	93.89 %
			051.0H	Blokir Anggaran LAUTRA	0	0	0.00 %
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				1,695,000,000	1,691,726,662	99.81 %
HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				200,000,000	197,265,788	98.63 %
	PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan			200,000,000	197,265,788	98.63 %
	PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar			200,000,000	197,265,788	98.63 %
		051	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang disusun (PNBP)		200,000,000	197,265,788	98.63 %
			051.0A	Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	200,000,000	197,265,788	98.63 %
HB.2366	Penataan Ruang Laut				1,495,000,000	1,494,460,874	99.96 %
	PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan			875,000,000	874,473,149	99.94 %
	PBT.009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah			875,000,000	874,473,149	99.94 %
		052	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut		78,053,000	77,887,825	99.79 %
			052.0A	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	78,053,000	77,887,825	99.79 %
		053	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut		796,947,000	796,585,324	99.95 %
			053.0A	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	286,237,000	286,177,442	99.98 %
			053.0B	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	510,710,000	510,407,882	99.94 %
	RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan			620,000,000	619,987,725	100.00 %
	RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut			620,000,000	619,987,725	100.00 %
		051	Sarana pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut		620,000,000	619,987,725	100.00 %
			051.0A	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut	620,000,000	619,987,725	100.00 %
WA	Program Dukungan Manajemen				10,755,288,000	10,124,980,099	94.14 %
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut				10,755,288,000	10,124,980,099	94.14 %
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			10,464,335,000	9,835,385,486	93.99 %
	EBA.956	Layanan BMN			48,770,000	48,640,396	99.73 %
		051	Layanan BMN		48,770,000	48,640,396	99.73 %
			051.0A	Pengelolaan Barang Milik Negara	48,770,000	48,640,396	99.73 %
	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			15,294,000	15,292,668	99.99 %
		051	Layanan Kehumasan		15,294,000	15,292,668	99.99 %
			051.0A	Layanan Kehumasan	15,294,000	15,292,668	99.99 %
	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			6,335,000	6,128,558	96.74 %
		051	Layanan Organisasi dan Tata Laksana lingkup Ditjen PRL		6,335,000	6,128,558	96.74 %
			051.0A	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	6,335,000	6,128,558	96.74 %
	EBA.962	Layanan Umum			81,009,000	80,533,882	99.41 %
		051	Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan		32,982,000	32,606,908	98.86 %
			051.0A	Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	32,982,000	32,606,908	98.86 %
		052	Layanan Rumah Tangga		48,027,000	47,926,974	99.79 %
			052.0A	Layanan Rumah Tangga	48,027,000	47,926,974	99.79 %
	EBA.994	Layanan Perkantoran			10,312,927,000	9,684,789,982	93.91 %
		001	Gaji dan Tunjangan		8,019,517,000	7,411,987,281	92.42 %

Uraian				Pagu	Realisasi	%
		001.0A	Pembayaran gaji dan tunjangan	8,019,517,000	7,411,987,281	92.42 %
		002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,293,410,000	2,272,802,701	99.10 %
		002.0A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,293,410,000	2,272,802,701	99.10 %
	EBC		Layanan Manajemen SDM Internal	65,355,000	64,950,193	99.38 %
	EBC.954		Layanan Manajemen SDM	65,355,000	64,950,193	99.38 %
		051	Layanan Manajemen SDM	65,355,000	64,950,193	99.38 %
		051.0A	Layanan SDM	65,355,000	64,950,193	99.38 %
	EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal	225,598,000	224,644,420	99.58 %
	EBD.952		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	70,594,000	70,094,724	99.29 %
		051	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	70,594,000	70,094,724	99.29 %
		051.0A	Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran	70,594,000	70,094,724	99.29 %
	EBD.953		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	49,991,000	49,974,522	99.97 %
		051	Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	49,991,000	49,974,522	99.97 %
		051.0A	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan	49,991,000	49,974,522	99.97 %
	EBD.955		Layanan Manajemen Keuangan	105,013,000	104,575,174	99.58 %
		051	Layanan Manajemen Keuangan	105,013,000	104,575,174	99.58 %
		051.0A	Pengelolaan Keuangan	105,013,000	104,575,174	99.58 %

3.4 Tindak Lanjut atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang tertuang pada Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.3744/DJPK.1/RC.610/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada BPSPL Denpasar telah diperoleh Nilai Hasil Penilaian APIP BPSPL Denpasar Tahun 2025 adalah 86,90 dengan predikat penilaian A. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut tidak ditemukan kelemahan pada pelaksanaan SAKIP Tahun 2025 namun dengan adanya penambahan anggaran PNPB sebesar Rp103,145 miliar (optimasi persetujuan PNPB dari 10% menjadi 23%) melalui revisi DIPA TA 2025 tanggal 31 Oktober 2025 terjadi perubahan signifikan dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan perizinan dan dukungan PNPB lingkup Direktorat Jenderal PKRL, yang seharusnya diikuti dengan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) level 2 Pusat dan UPT. BPSPL Denpasar direkomendasikan untuk menindaklanjuti perubahan anggaran tersebut dengan membuat memorandum usulan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sehubungan dengan catatan tersebut BPSPL Denpasar telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor B.3589/BPSPL.4/RC.610/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Usulan

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BPSPL Denpasar. Adapun surat usulan sebagaimana terlampir pada bab lampiran 4.

3.5 Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan realisasi capaian kinerja BPSPL Denpasar dengan BPSPL Makassar hingga akhir Tahun 2025.

Tabel 34. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		BPSPL Denpasar s.d. Triwulan IV 2025			BPSPL Makassar s.d. Triwulan IV 2025		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	1	1	100	1	1	100
2	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	30	30	100	40	70	120
3	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5	7	120	5	10	120
4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)	80	90	112,50	80	99,91	120
5	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1	1	100	1	1	100
6	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	2	2	100	2	2	100
7	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	70	86,90	120	70	92	120
8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	89	94,11	105,74	89	89,73	100,8
9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	71,5	97,86	120	71,5	100	120
10	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4	4	100	4	4	100
11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	80	86,85	108,56	80	89,82	112,3
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan	95	87	91,58	95	100	105,26

INDIKATOR KINERJA		BPSPL Denpasar s.d. Triwulan IV 2025			BPSPL Makassar s.d. Triwulan IV 2025		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
	untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)						
13	Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100	100	100	100	100	100
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai)	75	87,57	116,76	75	87,41	116,5
15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	80	86,11	107,64	70	85	120
16	Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	76	100	120	76	100	120
17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	91	100	109,89	91	100	109,89

Dari hasil perbandingan terhadap dua indikator kinerja BPSPL Denpasar lebih unggul dari BPSPL Makassar pada indikator kinerja: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai); dan Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai). Hal tersebut dikarenakan nilai IKPA BPSL Denpasar lebih unggul dari pada BPSPL Makassar penyerapan anggaran BPSPL Denpasar lebih optimal dibandingkan BPSPL Makassar. Begitu juga dengan nilai unit kinerja berpredikat menuju WBK BPSPL Denpasar sedikit lebih unggul dari pada BPSPL Makassar berdasar penilaian yang dilakukan oleh Itjen.

Terdapat tiga indikator kinerja yang telah sesuai target tetapi presentase kurang dari BPSPL Makassar antara lain indikator kinerja Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang), Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis), dan Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai). Pada tiga indikator tersebut BPSPL Denpasar telah mencapai target namun hanya kurang dari BPSPL Makassar. Terkait masyarakat yang ditingkatkan BPSPL Denpasar memiliki beberapa tahap dalam peningkatan kapasitas masyarakat. Untuk jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan adalah setiap UPT berbeda jenis layanan dan jenis produk yang dilayani. Sehingga capaian tidak dapat disamakan.

Terdapat satu indikator yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%) BPSPL

Denpasar lebih rendah dari pada BPSPL Makassar. Hal tersebut dikarenakan adanya catatan hasil pengawasan APIP pada aplikasi SIDAK yang belum ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2025. Terdapat satu indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai) BPSPL Denpasar lebih rendah dari BPSPL Makassar, namun hal tersebut tidak dapat dibandingkan karena target berbeda dan penilaian yang dilakukan sama. Target BPSPL Denpasar tetap dari Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2025. Sedangkan 10 indikator lainnya capaian BPSPL Denpasar dan BPSPL Makassar sama yaitu telah mencapai target tahunan. Hal tersebut membuktikan bahwa BPSPL Denpasar dapat setara dengan UPT PSPL lainnya.



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Capaian kinerja IKU BPSPL Denpasar Tahun 2025 dinilai baik jika dilihat dari penilaian di aplikasi kinerjaku yaitu sebesar 106,07%. Capaian kinerja BPSPL Denpasar telah tercapai 16 indikator kinerja dari 17 indikator kinerja. Terdapat satu indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%). Adapun uraian capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. IK 1 Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi) 1 provinsi;
2. IK 2 Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang) 30 orang;
3. IK 3 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) 7 jenis;
4. IK 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai) Nilai 90;
5. IK 5 Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) 1 dokumen;
6. IK 6 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) 2 dokumen;
7. IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) Nilai 86,90;
8. IK 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) Nilai 94,11;
9. IK 9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) Nilai 97,86;
10. IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) 4 dokumen;
11. IK 11 Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (Indeks) Nilai 86,85;
12. IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%) 87%;
13. IK 13 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%) 100%;
14. IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai) dengan Nilai 87,57;
15. IK 15 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai) Nilai 86,11;
16. IK 16 Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Denpasar (%) 100%;

17. IK 17 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Denpasar (Nilai) Nilai 100.

Capaian kinerja BPSPL Denpasar seluruhnya mendukung capaian Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Berdasarkan kondisi tersebut terdapat tantangan yaitu perlunya dilakukan evaluasi kegiatan serta melakukan tindak lanjut atas capaian hasil pengawasan APIP tahun 2025.

5.2 Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi capaian kinerja pada triwulan selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan pertemuan untuk evaluasi kegiatan Tahun 2025; dan
2. Menindaklanjuti catatan hasil pengawasan APIP Tahun 2025

5.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Sebelumnya

Telah diupayakan tindak lanjut terhadap rekomendasi pada periode sebelumnya antara lain sebagai berikut:

Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Tindak Lanjut
Melakukan revisi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja kegiatan BPSPL Denpasar	Telah dilakukan revisi anggaran	https://drive.google.com/drive/folders/1qrZ7uCjc0bR_1a9PXwwea9SOrfRXvBq?usp=drive_link
Melakukan koordinasi dengan Eselon I terkait status penerbitan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut	Telah dilakukan koordinasi	https://drive.google.com/drive/folders/13-wd5-88O9t7YWcg9_o-N3eCXlRCQR3H?usp=drive_link
Melakukan revisi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja kegiatan BPSPL Denpasar	Telah dilakukan revisi anggaran	https://drive.google.com/drive/folders/1qrZ7uCjc0bR_1a9PXwwea9SOrfRXvBq?usp=drive_link
Melakukan percepatan realisasi anggaran	Telah dilakukan percepatan realisasi anggaran	https://drive.google.com/drive/folders/1jhMuHQCnmfKMBRIIbFLdO2Tom67uAMs1?usp=drive_link

Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Tindak Lanjut
Melakukan revisi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja kegiatan BPSPL Denpasar	Telah dilakukan revisi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja kegiatan BPSPL Denpasar	https://drive.google.com/drive/folders/1qrZ7uCjc0bR_1a9PXwwea9SOrfRXvBq?usp=drive_link
Melakukan percepatan realisasi anggaran	Telah dilakukan percepatan realisasi anggaran	https://drive.google.com/drive/folders/1jhMuHQCnmfKMBRIIbFLdO2Tom67uAMs1?usp=drive_link
Melakukan mitigasi aplikasi e-SAJI untuk mendukung pelayanan yang lebih baik	Telah dilakukan mitigasi aplikasi e-SAJI untuk mendukung pelayanan yang lebih baik dengan bersurat kepada Pusdatin	https://drive.google.com/drive/folders/1On38U1uNQDI0rfVjK1aQ4eaQiyBOM4AA?usp=drive_link



LAMPIRAN



BAB V

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Awal



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridinprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) DENPASAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Getreda Melsina Hehanussa**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

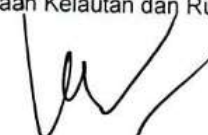
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar



Getreda Melsina Hehanussa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar	1.	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	1
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	30
3.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
4.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	2
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	88
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	71,5
		9.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	87
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)	95
		12. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		13. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	80
		15. Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	76
		16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	7.540.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000
3.	Penataan Ruang Laut	875.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	12.012.700.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2025		20.627.700.000

Jakarta 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar


Getreda Melsina Hehanussa

2. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Revisi I



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL djtenpk@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) DENPASAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Getreda Melsina Hehanussa**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Getreda Melsina Hehanussa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	1.	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	1
2.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	30
3.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
4.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)	80
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	70
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	89
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	71,5
		9.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
		10.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (Indeks)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Denpasar (%)	95
		12.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		13.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	80
		15.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	76
		16.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Denpasar (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	7.540.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	12.012.700.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2025		19.752.700.000

Jakarta,30 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Getreda Melsina Hehanussa



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenpri@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) DENPASAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Getreda Melsina Hehanussa**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Getreda Melsina Hehanussa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) DENPASAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	2

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penataan Ruang Laut	875.000.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2025		875.000.000

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Getreda Melsina Hehanussa

3. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Revisi II



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) DENPASAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Getreda Melsina Hehanussa**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara



Ditandatangani
Secara Elektronik

Getreda Melsina Hehanussa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	1.	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	1
2.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	30
3.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
4.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Nilai)	80
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	70
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	89
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	71,5
		9.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
		10.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (Indeks)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Denpasar (%)	95
		12.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		13.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	80
		15.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	76
		16.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Denpasar (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	17.635.234.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	513.820.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	11.411.878.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2025		29.560.932.000

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Getreda Melsina Hehanussa



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridijenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) DENPASAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Getreda Melsina Hehanussa**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Getreda Melsina Hehanussa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) DENPASAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	2

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penataan Ruang Laut	1.495.000.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2025		1.495.000.000

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Getreda Melsina Hehanussa

4. Tindak Lanjut atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
 TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

Nomor : B.3589/BPSPL.4/RC.610/XII/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Usulan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BPSPL Denpasar

31 Desember 2025

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
- di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.3744/DJPK.1/RC.610/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada BPSPL Denpasar, dan sehubungan dengan adanya penambahan anggaran PNBPN sebesar Rp11.029.054.000,- melalui Revisi DIPA TA 2025 tanggal 31 Oktober 2025. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar mengusulkan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana dokumen terlampir pada tautan sebagai berikut https://bit.ly/DRAFT_PK_BPSPLDenpasar.

Demikian disampaikan atas perhatian dan arahan lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Balai Pengelolaan Sumber
 Daya Pesisir dan Laut Denpasar,



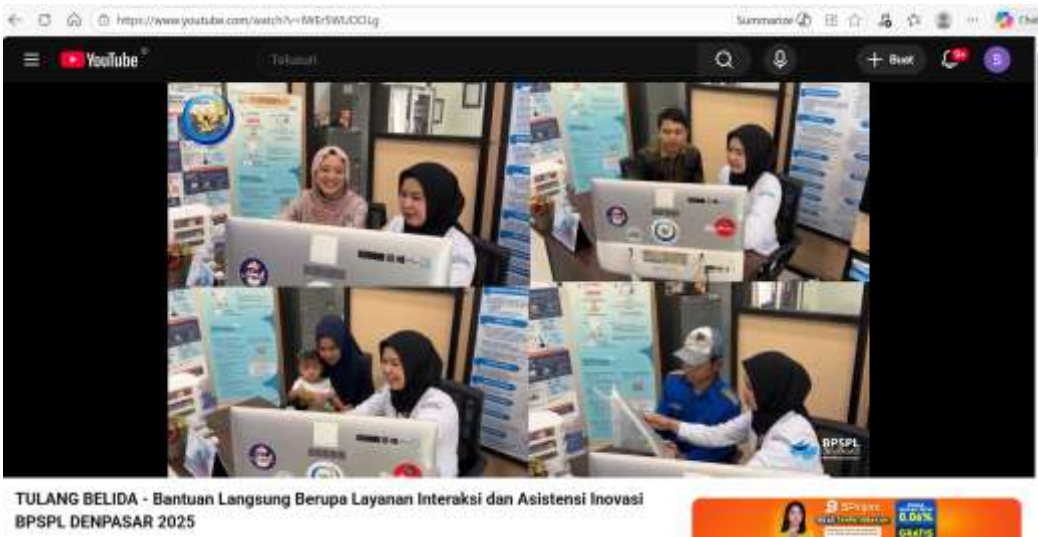
Ditandatangani
 Secara Elektronik

A.Boby Yefry Adi Rianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Inovasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar: Bantuan Langsung Berupa Layanan Interaksi dan Asistensi (TULANG BELIDA)

[TULANG BELIDA - Bantuan Langsung Berupa Layanan Interaksi dan Asistensi Inovasi BPSPL DENPASAR 2025 - YouTube](#)



- Penghargaan Satker dengan Presentase Tertinggi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Tahun 2024 yang Diserahkan pada Bulan Januari 2025



- Piagam Penghargaan Atas Capaian Kinerja Organisasi Predikat Baik Triwulan IV Tahun 2024



- Piagam Penghargaan sebagai Unit Organisasi Berpredikat Informatif



- Satuan Kerja Terbaik Ke-2 Kategori Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Transaksi Tertinggi di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar Semester II Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Denpasar Nomor KEP-40/KPN.2201/2025 tanggal 16 Januari 2025

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
DENPASAR NOMOR : KEP-40/KPN.2201/2025
TANGGAL : 16 JANUARI 2025

PENETAPAN SATUAN KERJA TERBAIK
KATEGORI PENGGUNA KARTU KREDIT PEMERINTAH TRANSAKSI TERTINGGI
DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
DENPASAR SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE BA	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	032	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA
2.	032	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
3.	029	400569	PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN LHK EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA

- Piagam Penghargaan atas Nilai Capaian Kinerja Organisasi Predikat Baik (109,47) Triwulan I Tahun 2025



- Piagam Penghargaan atas Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan) yang diserahkan pada Juni 2025



- Satker dengan Penyelenggaraan Rekonsiliasi SAKTI Terbaik Periode Semester I Tahun 2025 lingkup Satker Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



26th
KKP



BPSPL
DENPASAR
#BijakMengelolaLaut

